



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan wajib menyusun dokumen perencanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan selama tiga tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen Renstra ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana aksi *Stakeholders* jajaran kesehatan khususnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 mencakup perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan 3 (tiga) UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud dan Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan kita kemudahan dalam mewujudkan derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 19 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	10
2.1.1 Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	10
2.1.2 Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	10
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	11
2.1.3.1 Tugas dan Fungsi UPTD. Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau	14
2.1.3.2 Tugas dan Fungsi RSUD Raja Ahmad Tabib	15
2.1.3.3 Tugas dan Fungsi UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	21
2.1.3.4 Pengembangan Unit Pelaksana Tugas Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat	26
2.1.4 Struktur Organisasi	27
2.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.1.5.1 Sumber Daya Manusia	30
2.1.5.2 Sarana dan Prasarana	34
2.1.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.1.7 Kelompok Sasaran Layanan	60
2.1.8 Mitra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	61
2.1.9 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	62
2.1.10 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	63
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	64

2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.2.2	Isu Strategis.....	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		71
3.1.	Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	71
3.2.	Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	74
3.3.	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	76
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		82
4.1.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	82
4.1.1.	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	82
4.1.2.	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	141
4.2.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	145
4.3.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	146
BAB V PENUTUP		149
5.1.	Kesimpulan.....	149
5.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	150
5.3.	Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko.....	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
Gambar 2. 1	SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	27
Gambar 2. 2	SOTK UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	28
Gambar 2. 3	SOTK RSUD Raja Ahmad Tabib	28
Gambar 2. 4	SOTK RSJKO Engku Haji Daud	29
Gambar 2. 5	Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	41
Gambar 2. 6	Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	42
Gambar 2. 7	Capaian Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	43
Gambar 2. 8	Persentase Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024.....	44
Gambar 2. 9	Persentase Warga Negara Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	44
Gambar 2. 10	Capaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	45
Gambar 2. 11	Capaian Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan.....	46
Gambar 2. 12	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	47
Gambar 2. 13	Capaian Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	48
Gambar 2. 14	Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	49
Gambar 2. 15	Capaian Melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM	50
Gambar 2. 16	Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	51
Gambar 2. 17	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi.....	52
Gambar 2. 18	Persentase Puskesmas Terakreditasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	53
Gambar 2. 19	Persentase Penduduk Dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024.....	54
Gambar 2. 20	Persentase Ketersediaan Obat di Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	54
Gambar 2. 21	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	55
Gambar 2. 22	Persentase Sarana Distribusi Farmasi Cabang Yang Sesuai Standar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	56
Gambar 2. 23	Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	57
Gambar 2. 24	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	30
Tabel 2. 2	Jumlah SDM PPPK dan Non ASN Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	30
Tabel 2. 3	Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	31
Tabel 2. 4	Jumlah SDM UPT Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau	32
Tabel 2. 5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil UPTD Instalasi Farmasi	32
Tabel 2. 6	Jumlah SDM PPPK dan Non ASN UPTD Instalasi Farmasi.....	33
Tabel 2. 7	Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan UPTD Instalasi Farmasi	33
Tabel 2. 8	Daftar Aset yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	34
Tabel 2. 9	Daftar Aset RSUD Raja Ahmad Tabib	35
Tabel 2. 10	Daftar Aset RSJKO Engku Haji Daud	36
Tabel 2. 11	Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 -2024	37
Tabel 2. 12	Kerjasama Daerah dengan Dinas Kesehatan	63
Tabel 2. 13	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	69
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	73
Tabel 3. 2	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	75
Tabel 3. 3	Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	76
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	77
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	90
Tabel 4. 2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	135
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	141
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	145
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	146

LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan UPT Tahun 2025-2029
- Lampiran 2** : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
- Lampiran 3** : Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025-2029
- Lampiran 4** : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2025-2029
- Lampiran 5** : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 14/SK-DINKES/I/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa kebutuhan ketersediaan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sebagaimana yang disebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 di bebaskan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 14/SK-DINKES/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029**

- I. PELINDUNG/PEMBINA

: GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
- II. PENANGGUNG JAWAB

: KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
- III. PENGARAH

:
Ketua : Sekretaris (dr. YOSEI SUSANTI
M.A.P)
Anggota : Kabid Pelayanan (SUSILO BUDI
Kesehatan HARTANTO , S.Si, Apt)
Kabid Kesehatan (drg MARDIANSYAH,
M.Kes)
Kabid Pencegahan dan (dr. RAJA DINA
Pengendalian Penyakit ISWANTY)
Kabid Sumber Daya (Dr. PUTRI RAHMAWATI,
Kesehatan MKM)
Kepala UPTD Instalasi (INDRI AYU NINGSIH,
Farmasi Provinsi Dinas S.Farm, Apt)
Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau
Direktur RSUD Raja (dr. BAMBANG UTOYO,
Ahmad Tabib Provinsi M.A.P)
Kepulauan Riau
Direktur RSJKO Engku (dr. ASEP GUNTUR
Haji Daud Provinsi SAPARI, MARS)
Kepulauan Riau
- IV. PELAKSANA

:
Ketua : Ketua Tim Kerja (NOVARITA,
Perencanaan dan SKM,M.Epid)
Evaluasi
Anggota : Penelaah Teknis (M. HAMID, SKM)
Kebijakan
Administrator (DESI YERI M, SKM)
Kesehatan Ahli Muda
Pegawai Harian Lepas (JUMADI, SKM)
Bidang Sekretariat
Pegawai Harian Lepas (UMI UMAIRAH, S.KM)
Bidang Sekretariat
Pegawai Harian Lepas (SYELFIN AKBAR FAJAR,
Bidang Sekretariat SH)
Pegawai Harian Lepas (NAILI AMALIA, SKM)
Bidang Sekretariat
Pegawai Harian Lepas (IIN NIRVIANA, A.Md.KL)
Bidang Sekretariat
Pegawai Harian Lepas (JUANDA)
Bidang Sekretariat
- V. PERUMUS

:
Pejabat Fungsional : Administrator (ASMALI, SKM, M.Si,
Kesehatan Ahli Madya MPH)
Administrator (ANDI KURNIAWAN,
Kesehatan Ahli Madya SKM, MPH)
Pejabat Pengawas Kasubbag Umum dan (YESSI ERFANA,

Tim Kerja	:	Kepegawaian	Amd.Keb)
		Kasi Kefarmasian dan	(SUMIYATI, S.Si, APT)
		Alat Kesehatan	
		Kasi Kesga dan Gizi	(ANIESAPUTRI JUNITA,
		Masyarakat	SKM, MPH)
		Kasi Promosi	(dr. INDRIKE CAESARIA)
		Kesehatan dan	
		Pemberdayaan	
		Masyarakat	
		Kasi Pelayanan	(IFFAH LATHIFAH,
		Kesehatan Primer	A.Md.Farm, S.I.Kom)
		Kasi Pelayanan	(Ns. DIAN LOFIANA
		Kesehatan Rujukan	GINTING MUNTHER,
			S.Kep)
		Kasi Sumber Daya	(ELFRIDA TAMBUN,
		Manusia Kesehatan	SKM, MPH)
		Kasi Pencegahan dan	(DIAN FEBRIANTI, SKM)
		Pengendalian Penyakit	
		Menular	
		Kasi Surveilans dan	(FENTY OCTRIANA S.KL)
		Imunisasi	
		Ketua Tim Kerja	(NOVARITA,
		Perencanaan dan	SKM,M.Epid)
		Evaluasi	
		Ketua Tim Kerja	(HERIYANTO, AMK)
		Pembiayaan Jaminan	
		Kesehatan	
		Ketua Tim Keuangan	(TRI HARDIONO ERWIN,
		dan Aset	SE, MM)
		Ketua Tim Kerja	(ARDANI AKHIRUDIN,
		Kesehatan Tradisional,	SKM)
		Kesehatan Jiwa,	
		Kesehatan Kerja dan	
		Olahraga	
		Ketua Tim Kerja	(ABDUL RAUF RAHIM,
		Pencegahan dan	SKM, M.Si)
		Pengendalian Penyakit	
		Tidak Menular	

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 197101091995011001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 182/SK-DINKES/V/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR : 14/SK-DINKES/I/2025 TENTANG TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- b. bahwa kebutuhan ketersediaan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sebagaimana yang disebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 di bebaskan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 3 Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 182/SK-DINKES/V/2025
Tanggal : 3 Juni 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029**

- I. PELINDUNG/PEMBINA

: GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
- II. PENANGGUNG JAWAB

: KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
- III. PENGARAH

:

Ketua

: Sekretaris

(dr. YOSEI SUSANTI
M.A.P)

Anggota

: Kabid Pelayanan
Kesehatan
Kabid Kesehatan
Masyarakat
Kabid Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Kabid Sumber Daya
Kesehatan
Kepala UPTD Instalasi
Farmasi Provinsi Dinas
Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau
Direktur RSUD Raja
Ahmad Tabib Provinsi
Kepulauan Riau
Direktur RSJKO Engku
Haji Daud Provinsi
Kepulauan Riau

(SUSILO BUDI
HARTANTO , S.Si, Apt)
(dr. RAJA DINA
ISWANTY)
(Hj. MARDIANTI, SE,
MAP)
(Dr. PUTRI RAHMAWATI,
MKM)
(INDRI AYU NINGSIH,
S.Farm, Apt)

(dr. BAMBANG UTOYO,
M.A.P)

(dr. ASEP GUNTUR
SAPARI, MARS)
- IV. PELAKSANA

:

Ketua

: Ketua Tim Kerja
Perencanaan dan
Evaluasi

(NOVARITA,
SKM,M.Epid)

Anggota

: Penelaah Teknis
Kebijakan
Administrator
Kesehatan Ahli Muda
Administrator
Kesehatan Ahli
Pertama
Administrator
Kesehatan Ahli
Pertama
Penata Layanan
Operasional
Penata Layanan
Operasional
Pengelola Layanan
Operasional
Pengelola Layanan
Operasional
Pegawai Harian Lepas
Bidang Sekretariat

(M. HAMID, SKM)

(DESI YERI M, SKM)

(JUMADI, SKM)

(UMI UMAIRAH, S.KM)

(SYELFIN AKBAR FAJAR,
SH)
(NAILI AMALIA, SKM)

(IIN NIRVIANA, A.Md.KL)

(NURULITA ADE SUPINA,
A.Md.kes)
(JUANDA)

V. PERUMUS

Pejabat Fungsional	:	Administrator Kesehatan Ahli Madya	(ASMALI, SKM, M.Si, MPH)
		Administrator Kesehatan Ahli Madya	(ANDI KURNIAWAN, SKM, MPH)
Pejabat Pengawas		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	(YESSI ERFANA, Amd.Keb)
		Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	(SUMIYATI, S.Si, APT)
		Kasi Kesga dan Gizi Masyarakat	(ANIESAPUTRI JUNITA, SKM, MPH)
		Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	(dr. INDRIKE CAESARIA)
		Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	(IFFAH LATHIFAH, A.Md.Farm, S.I.Kom)
		Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	(Ns. DIAN LOFIANA GINTING MUNTHE, S.Kep)
		Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	(NOVIA ALVIANI, AMK)
		Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	(DIAN FEBRIANTI, SKM)
		Kasi Surveilans dan Imunisasi	(FENTY OCTRIANA S.KL)
Tim Kerja	:	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi	(NOVARITA, SKM,M.Epid)
		Ketua Tim Kerja Pembiayaan Jaminan Kesehatan	(HERIYANTO, AMK)
		Ketua Tim Keuangan dan Aset	(TRI HARDIONO ERWIN, SE, MM)
		Ketua Tim Kerja Kesehatan Tradisional, Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Kerja dan Olahraga	(ARDANI AKHIRUDIN, SKM)
		Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	(ABDUL RAUF RAHIM, SKM, M.Si)

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memegang peran strategis sebagai fondasi bagi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti disparitas layanan antarwilayah, beban ganda penyakit, kualitas gizi masyarakat yang belum optimal, serta kebutuhan akan transformasi sistem kesehatan pascapandemi.

Upaya pembangunan kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai landasan bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dengan dilantikannya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2025–2029, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah. Penetapan RPJMD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal diatas, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu merespons dinamika tersebut secara adaptif dan terarah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dibuat sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang

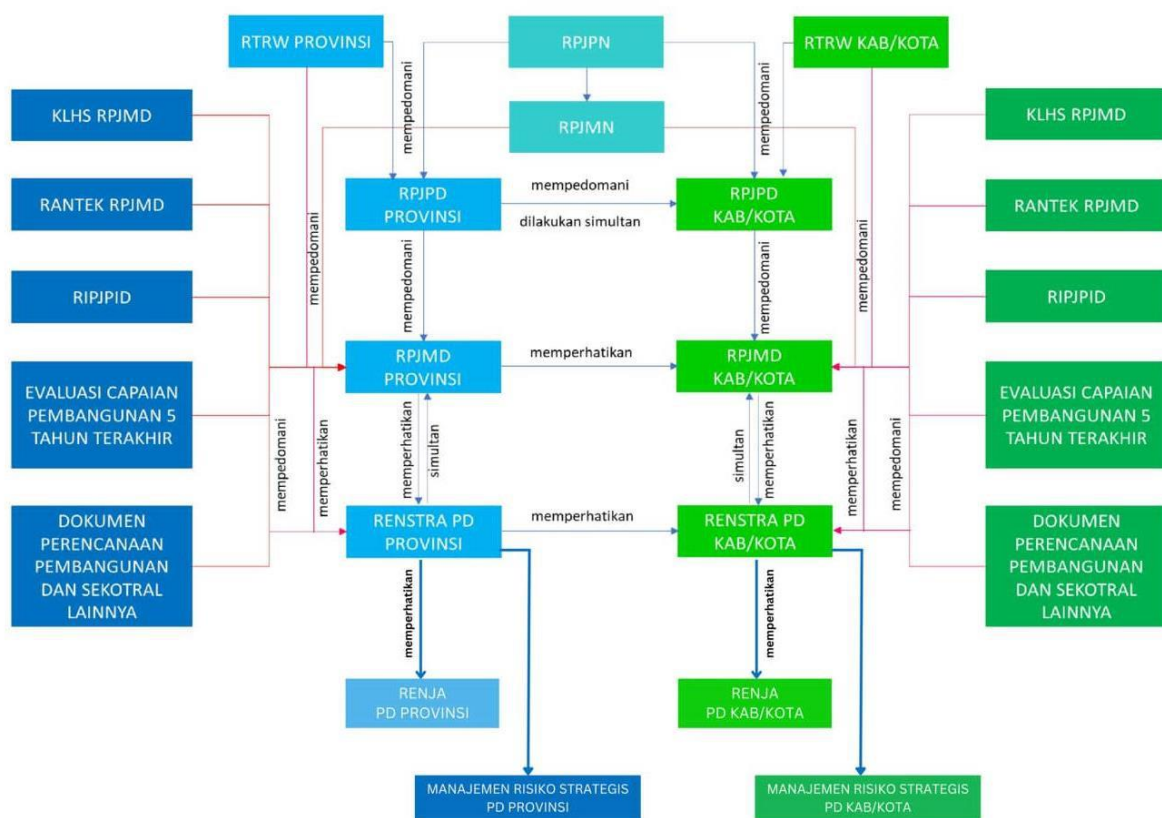
memuat visi, arah kebijakan, strategi, serta sasaran yang selaras dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, guna mendukung terwujudnya masyarakat sehat di Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan pendekatan, meliputi pendekatan berorientasi pada proses yaitu teknokratis, partisipatif, politik, bottom up dan top-down, dan pendekatan berorientasi pada substansi yaitu tematik, holistik, integratif dan spasial.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui sembilan tahapan utama yang saling berkesinambungan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama diawali dengan persiapan yang meliputi orientasi penyusunan Renstra, pembentukan tim penyusun, analisis evaluasi hasil pembangunan lima tahun terakhir, serta inventarisasi data dan informasi perencanaan yang relevan.
- 2) Tahap kedua adalah penyusunan Rancangan Awal Renstra (Ranwal) yang mencakup pendahuluan, gambaran kondisi pelayanan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan utama.
- 3) Tahap ketiga adalah penyusunan Rancangan Renstra sebagai penyempurnaan dari Ranwal berdasarkan surat edaran Kepala Daerah yang memuat lampiran Ranwal RPJMD.
- 4) Tahap keempat adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik dan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menyepakati keluaran Renstra dan memastikan keterpaduan antar-Renstra perangkat daerah. Hasil forum ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- 5) Tahap kelima, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra oleh Bappeda untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD dan hasil kesepakatan forum.
- 6) Tahap keenam dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra, yaitu penyempurnaan dokumen berdasarkan substansi yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD.

- 7) Tahap ketujuh adalah proses reviu oleh APIP, yang hasilnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra.
- 8) Tahap kedelapan berupa verifikasi akhir oleh Bappeda guna menjamin konsistensi dokumen dengan RPJMD. Jika terdapat ketidaksesuaian, Bappeda memberikan rekomendasi perbaikan sebelum proses penetapan.
- 9) Tahap kesembilan, sekaligus tahap akhir, adalah penetapan Renstra oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), paling lambat satu bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025–2029.



Gambar 1. 1
Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan memperhatikan atas Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka penyusunan renstra ini diselaraskan

juga dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Rencana Induk Bidang Kesehatan. Hubungan antar dokumen tersebut dapat digambarkan sesuai dengan gambaran keterkaitan renstra dan dokumen lainnya pada Gambar 1.1. yang tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra. Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan\] Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

- 
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

- 
- 16) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6952);
 - 17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 3);
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
 - 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 24) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 890);

- 
- 25) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
 - 26) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 906);
 - 27) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 927).
 - 28) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dengan memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- 2) Merumuskan arah pembangunan kesehatan sebagai acuan bagi pengembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kota.
- 3) Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan program/ kegiatan tahunan yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.
- 4) Sebagai tolak ukur terhadap dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| Bab I | Pendahuluan
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan. |
| Bab II | Gambaran pelayanan, permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Berisi gambaran profil pelayanan Dinas Kesehatan dan UPT. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi; Sumber daya; Kinerja pelayanan, Kelompok sasaran layanan, Mitra Dinas, Dukungan BUMD dan Kerjasama daerah, Permasalahan dan Isu Strategis. |
| Bab III | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Berisi tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, serta strategi dan arah kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029 |
| Bab IV | Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi susunan dan uraian atas rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan serta menguraikan Indikator Kinerja Utama dan serta Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 |
| Bab V | Penutup
Penutup berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan kesehatan. |

Lampiran

Matriks Program/Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT mencakup RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud dan UPTD. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.1 Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2.1.2 Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sekretariat

- Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- Fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
 - b. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
 - c. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
 - e. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - f. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

- Tugas : memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, kesehatan jiwa, Kesehatan kerja, Kesehatan tradisional.

- Fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kesehatan jiwa, Kesehatan kerja;
 - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Tugas : Memimpin dan melaksanakan tugas menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungan surveilans dan imunisasi.
- Fungsi :
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan lingkungan;
 - c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait surveilans dan imunisasi; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Pelayanan Kesehatan

– Tugas : Memimpin dan melaksanakan tugas menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan Kesehatan/ pembiayaan jaminan Kesehatan.

– Fungsi :

a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan primer;

b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, perizinan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan rujukan;

c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait mutu pelayanan Kesehatan/ pembiayaan jaminan kesehatan; dan

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

– Tugas : Memimpin dan melaksanakan tugas menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.

– Fungsi :

a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kefarmasian dan alat kesehatan;

b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait sumber daya manusia kesehatan;

- c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi UPTD. Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Unit Pelaksana Tugas Daerah Instalasi Farmasi, tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi sebagai berikut :

1. Tugas UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau
UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas yaitu pengelolaan penatausahaan, pemberian pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan operasional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - f. memberikan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi

- kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan tempat penyimpanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi;
- h. melaksanakan pemantauan mutu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi;
- i. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
- d. Kepala Seksi Pendistribusian dan Pengamanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

2.1.3.2 Tugas dan Fungsi RSUD Raja Ahmad Tabib

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebagai berikut :

1. Tugas UPTD RSUD Raja Ahmad Tabib

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya

rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi UPTD RSUD Raja Ahmad Tabib

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian/Bidang;
- d. Sub Bagian/Seksi
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Komite;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. Instalasi; dan
- i. Unit.

Tugas Direktur dan Wakil Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai berikut :

1) Direktur

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan secara efektif, bermutu dan efisien di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- b) pelaksanaan distribusi tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- c) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- d) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait pelayanan medik dan keperawatan;
- e) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- f) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

3) Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan

Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang, pendidikan, pelatihan,

penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - b) Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - c) Pelaksanaan pemberian pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - d) Pelaksanaan penyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - e) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait penunjang medik dan non medik, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
 - f) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - g) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dengan instalasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h) Pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang;
 - i) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan;
 - j) Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan penunjang dan pendidikan pelatihan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 4) Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan

pengendalian kegiatan umum, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan serta fasilitas-fasilitas/instalasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
- b) Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
- c) Pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
- d) Pelaksanaan penyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
- e) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
- f) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
- g) Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
- h) Pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
- i) Pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan pengembangan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi simrs dan instalasi lainnya;
- j) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan;
- k) elaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan; dan
- l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.3.3 Tugas dan Fungsi UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Tugas UPTD RSJKO Engku Haji Daud

UPTD RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan jiwa dan ketergantungan obat serta pelayanan umum dalam upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi UPTD RSJKO Engku Haji Daud

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPTD RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif

kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPTD RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian/Bidang;
- d. Satuan Pemeriksaan Internal;
- e. Komite;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Instalasi;

Tugas pokok dan fungsi bidang UPTD RSJKO Engku Haji Daud:

1) Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan menetapkan kebijakan teknis program, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit serta ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) merumuskan program kerja di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- c) membina bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;

- d) mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- e) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang yanmedik dan keperawatan;
- f) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- g) merumuskan kebijakan terkait fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bagian umum dan keuangan;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- i) menyusun pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan secara efektif, bermutu dan efisien di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a) menyusun rencana operasional di Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Pelayanan Medik dan Keperawatan;

- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- e) menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan medik;
- f) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keperawatan;
- g) menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan

Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang, Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keperawatan;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan;
- e) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait penunjang medik dan non medik;
- f) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan

- umum dan hubungan kerja terkait pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- g) menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan;
- h) pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dengan instalasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i) pengembangan pelayanan penunjang, Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan;
- k) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan serta fasilitas-fasilitas/Instalasi. Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Umum dan Keuangan;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Umum dan Keuangan ;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Umum dan Keuangan;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Umum dan Keuangan;
- e) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait administrasi umum;
- f) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan

- umum dan hubungan kerja terkait perencanaan;
- g) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keuangan;
- h) menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- i) menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
- j) pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan
- k) penyusunan, pemantauan dan pengembangan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi SIM RS dan Instalasi lainnya;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum, perencanaan, dan keuangan;
- m) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan umum, perencanaan, dan keuangan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

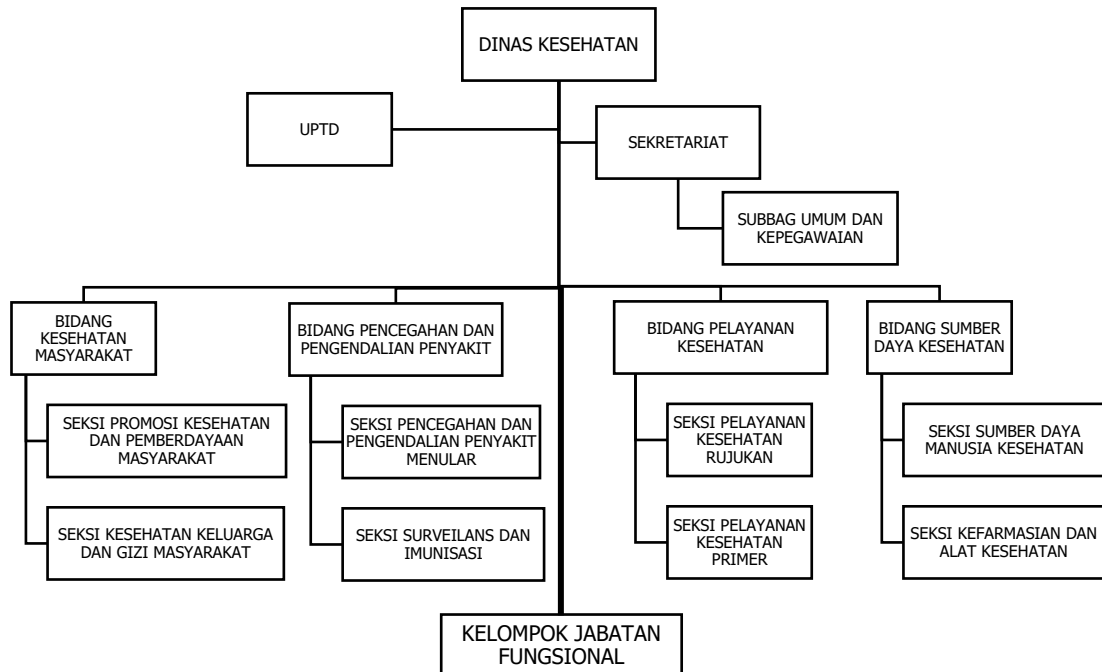
2.1.3.4 Pengembangan Unit Pelaksana Tugas Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah membangun UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier III di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang, yang direncanakan mulai beroperasi pada Juni 2026. Laboratorium ini disiapkan sebagai laboratorium rujukan provinsi dengan dukungan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana sesuai standar, serta penerapan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja. Kehadiran Labkesmas Tier III diharapkan mempercepat proses pemeriksaan dan validasi hasil uji, memperkuat deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi masalah kesehatan

masyarakat secara lebih merata di wilayah Kepulauan Riau.

2.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah seperti bagan berikut :



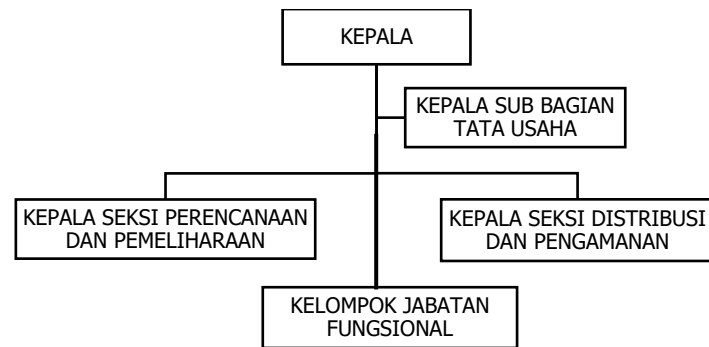
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2. 1

SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Gambar 2.1, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat memiliki 1 Subbag, sedangkan tiap bidang memiliki 2 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 9 orang.

Terdapat tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dan Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau.

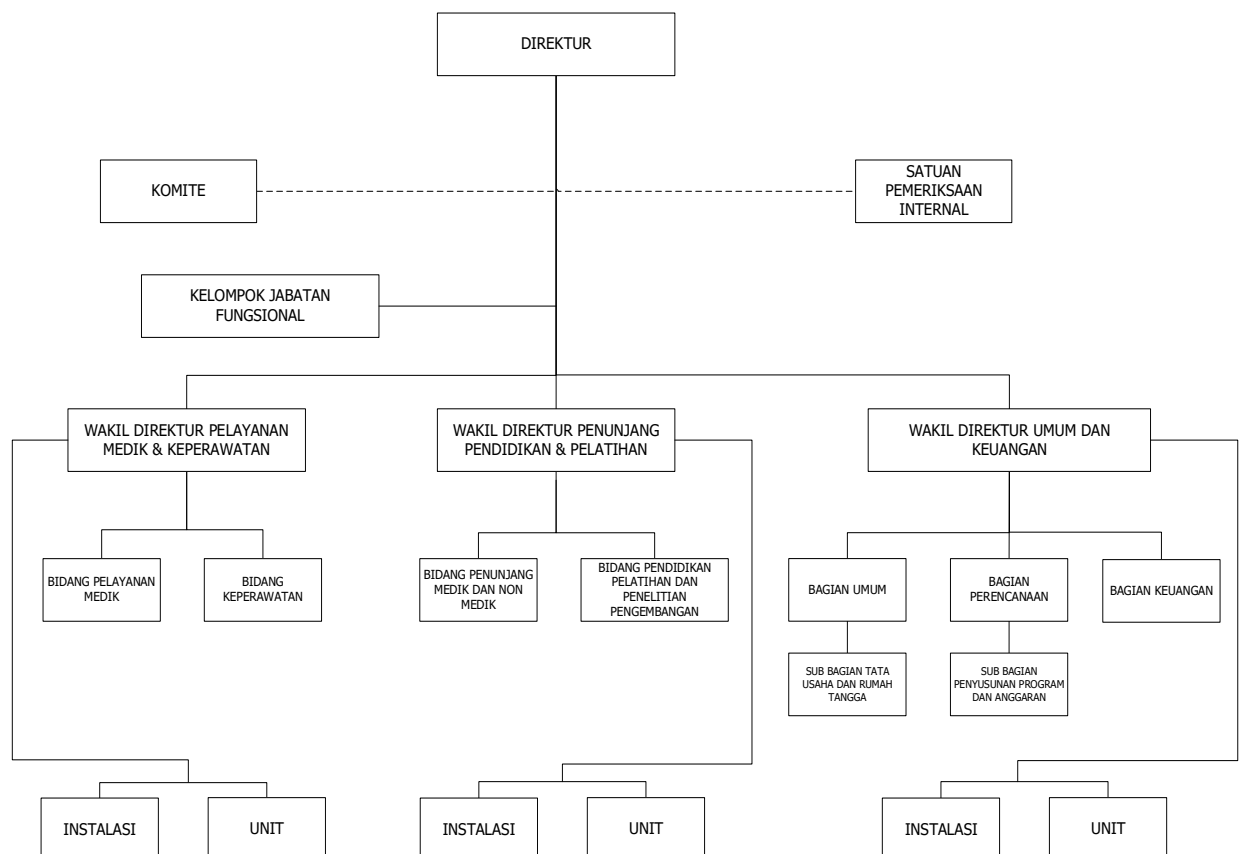


Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2. 2

SOTK UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau

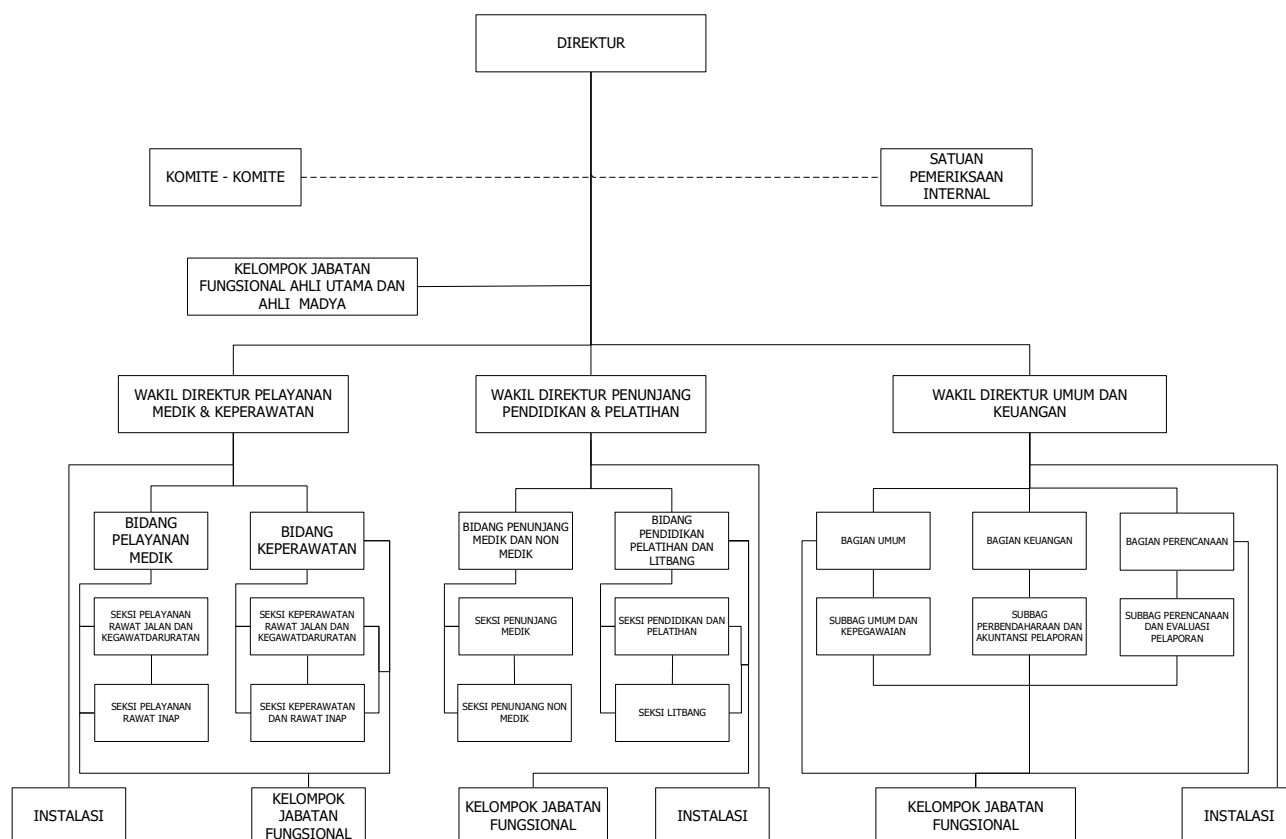
Instalasi Farmasi Provinsi terdiri dari 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian dibawahnya yaitu bagian Tata Usaha. lalu memiliki 2 (dua) seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan, serta Seksi Distribusi dan Pengamanan.



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2. 3
SOTK RSUD Raja Ahmad Tabib

RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan RS dengan Tipe B (RS Pendidikan Utama), terdiri atas 1 (satu) jabatan Direktur dan 3 (tiga) Wakil Direktur (Wadir) yaitu Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wadir Penunjang dan Pendidikan Pelatihan, Wadir Umum dan Keuangan. Jumlah Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang. Terdapat 3 (tiga) bagian, dengan jumlah 2 (dua) Subbag.



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2. 4
SOTK RSJKO Engku Haji Daud

RSJKO Engku Haji Daud merupakan RSUD Provinsi dengan Tipe B, terdiri atas 1 (satu) jabatan Direktur dan 3 (tiga) Wakil Direktur (Wadir) yaitu Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wadir Penunjang dan Pendidikan Pelatihan, Wadir Umum dan Keuangan. Jumlah Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang dengan jumlah seksi dibawahnya sebanyak 2 seksi per bidang. Terdapat 3 (tiga) bagian dengan jumlah subbag dibawahnya sebanyak 1 subbag per bagian.

2.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.5.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 170 orang yang terdiri atas SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 96 Orang, SDM PPPK sejumlah 69 orang dan Non ASN sejumlah 5 Orang.

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat eselon II	1							
2	Pejabat eselon III	1	4						
3	Pejabat eselon IV		3		6				
4	Staf PNS (Pelaksana)	2	2	7	26	1	2		
5	Staf PNS (Fungsional)	2	3	8	20				
Jumlah		6	12	15	512	1	2	0	0
Total PNS		88							

Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa jumlah SDM PNS laki-laki sejumlah 23 orang (24%) dan PNS Perempuan sejumlah 73 orang (76%). Jumlah PNS golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 67 orang dan golongan II sebanyak 5 orang. Berikut ini rincian SDM PPPK dan non ASN :

Tabel 2. 2
Jumlah SDM PPPK dan Non ASN
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Bidang Sekretariat	10	14	24
2	Bidang Yankes	4	7	8
3	Bidang P2PL	3	9	12
4	Bidang SDK	3	5	8
5	Bidang Promkes dan Kesga	5	8	13
Jumlah Non PNS		25	43	68

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat terlihat bahwa jumlah SDM PPPK dan non ASN perempuan lebih banyak berbanding laki-laki, dengan rincian laki-laki sejumlah 25 orang (37%) dan perempuan sejumlah 43 orang (63%). Bidang sekretariat memiliki jumlah SDM PPPK dan Non ASN yang lebih banyak berbanding bidang lainnya (26 orang). Rincian SDM berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1.	Pasca Sarjana (S3)	2	1	3	2
2.	Pasca Sarjana (S2)	6	21	27	16
3.	Sarjana (S1/DIV)	25	66	91	54
4.	Diploma III (D III)	6	21	27	16
5.	Diploma I (D I)	0	1	1	1
6.	SMA	12	7	19	11
7.	SMP	0	2	2	1
Total		51	119	170	100

Tabel 2.3. menunjukkan sebagian besar SDM (PNS, PPPK dan Non ASN) memiliki tingkat pendidikan Sarjana/DIV dengan jumlah sebanyak 91 orang (54%), selanjutnya tingkat pendidikan DIII mendominasi yaitu sebanyak 27 orang (16%). SDM dengan tingkat pendidikan pascasarjana sejumlah 27 orang (16%).

Distribusi SDM di RSUD Raja Ahmad Tabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud (EHD) sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diuraikan melalui Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2. 4
Jumlah SDM UPT Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau

NO	PROFESI	JUMLAH SDM	
		RSUD RAJA AHMAD TABIB	RSJKO HAJI ENSKU DAUD
1	Dokter Spesialis	51	19
2	Dokter Umum	31	12
3	Dokter Gigi	91	2
4	Perawat dan Bidan	336	133
5	Penunjang Medis	141	32
6	Penunjang Non Medis	294	12
Jumlah		854	210

Berdasarkan Tabel 2.4., pada tahun 2025, jumlah SDM RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 854 orang dengan jenis profesi terbanyak yaitu perawat dan bidan dengan jumlah 336 orang. Untuk Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud (EHD) memiliki jumlah SDM sebanyak 210 orang dan jenis profesi terbanyak yaitu perawat dan bidan dengan jumlah 133 orang.

UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 15 orang yang terdiri atas SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 9 Orang dan SDM non PNS sejumlah 6 orang.

Tabel 2. 5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil UPTD Instalasi Farmasi

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat eselon III		1						
2	Pejabat eselon IV			1	2				
3	Staf PNS (Pelaksana)				1				
4	Staf PNS (Fungsional)				3				
Jumlah		0	1	1	6	0	0	0	0
Total PNS		8							

Dari Tabel 2.5. terlihat bahwa jumlah SDM PNS laki-laki sejumlah 1 orang (11%) dan PNS Perempuan sejumlah 7 orang (89%). Seluruh PNS

di IFP saat ini merupakan Golongan III. Berikut ini rincian SDM PPPK dan non ASN :

Tabel 2. 6
Jumlah SDM PPPK dan Non ASN UPTD Instalasi Farmasi

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Staf PPPK (Fungsional)	0	1	1
2	Staf PPPK (Pelaksana)	2	1	3
3	Non ASN	2	0	2
Jumlah Non PNS		4	2	6

Berdasarkan Tabel 2.6. dapat terlihat bahwa jumlah SDM PPPK dan non ASN laki-laki lebih banyak berbanding perempuan, dengan rincian laki-laki sejumlah 4 orang (67%) dan perempuan sejumlah 2 orang (33%). Rincian SDM berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan UPTD Instalasi Farmasi

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1.	Pasca Sarjana (S3)	0	0	0	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	0	1	1	7
3.	Sarjana (S1/DIV)	3	5	8	57
4.	Diploma III (D III)	0	2	2	14
5.	SMA	2	1	3	21
Total		5	9	14	100

Tabel 2.7. menunjukkan sebagian besar SDM (PNS, PPPK dan Non ASN) memiliki tingkat pendidikan Sarjana/DIV dengan jumlah sebanyak 8 orang (57%), selanjutnya tingkat pendidikan D3 mendominasi yaitu sebanyak 2 orang (15%). SDM tingkat pendidikan SMA sengan jumlah 3 (21%) dan SDM tingkat pendidikan pascasarjana sejumlah 1 orang (7%).

2.1.5.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini Daftar aset yang dikelola hingga tahun 2025:

Tabel 2. 8
Daftar Aset yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Alat Kantor Lainnya	Unit	210
2	Alat-Alat Kedokteran	Unit	123
3	Alat Kesehatan Umum lainnya	Unit	408
4	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	Unit	78
5	Alat Laboratorium lainnya	Unit	45
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	90
7	Alat keselamatan Kerja	Unit	35
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	238
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	45
10	Kapal Motor	Unit	2
11	Alat Angkutan Kendaraan Roda 2	Unit	36
12	Alat Angkutan Kendaraan Roda 4	Unit	22
13	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Unit	1
14	Komputer Unit Lainnya	Unit	425

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
15	Alat Kantor dan Rumah Tangga Lain-lain	Unit	970

Berikut ini daftar aset yang dikelola oleh UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

Tabel 2. 9
Daftar Aset RSUD Raja Ahmad Tabib

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	Unit	1412
	a. Alat bengkel dan alat ukur	Unit	129
	b. alat kantor dan rumah tangga	Unit	576
	c. alat kedokteran dan kesehatan	Unit	554
	d. alat laboratorium	Unit	150
	e. alat persenjataan	Unit	3
2	Gedung dan bangunan	Unit	4
	a. Bangunan gedung	Unit	4
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Unit	6
	a. Jalan dan Jembatan	Unit	1
	b. Bangunan air	Unit	2
	c. Instalasi	Unit	3
	b. Bangunan Air / Irigasi	Unit	14

Tabel 2. 10
Daftar Aset RSJKO Engku Haji Daud

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Alat- alat Angkutan	Unit	23
2	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit	1593
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	48
4	Alat-alat Kedokteran	Unit	1093
5	Alat-alat Laboratorium	Unit	154
6	Alat Besar	Unit	50
7	Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Unit	115
8	Alat-alat Pertanian Dan Peternakan	Unit	82
9	Alat Keamanan	Unit	1
10	Komputer	Unit	365
11	Alat produksi,Pengolahan dan Pemurnian	Unit	6
12	Alat keselamatan Kerja	Unit	2
13	Peralatan Olahraga	Unit	8

2.1.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan untuk penyusunan Renstra dilihat dari pencapaian kinerja tahun 2021 - 2024, dimana empat tahun evaluasi ini memiliki target dari dua masa RPJMD yang berbeda yaitu RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026, sehingga terdapat indikator yang ada capaian di 2021 namun tidak memiliki capaian di tahun 2022-2024 dikarenakan adanya pergantian indikator. Rincian pencapaian kinerja dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2. 11
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 -2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	128	125	124	123	241	78	98	93	11	138	121	124
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	30	14	13	12	15	10	12	7	150	129	108	138
3.	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,20	-	-	-	13,4	-	-	-	117	-	-	-
4.	Prevalensi Stunting	%	-	15,8	15,3	14	-	15,4	16,8	15	-	103	90	93
5.	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100
6.	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100
7.	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Kab/Kota	2	2	5	5	2	6	5	6	100	300	100	120
8.	Prevalensi HIV	%	<0,5	-	-	-	<0,5	-	-	-	100	-	-	-
9.	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100,000 penduduk	per 100.000 penduduk	175	-	-	-	195	-	-	-	112	-	-	-
10.	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	-	64	68	72	-	72	81	96	-	113	119	133

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	-	43	43	57	-	57	81	86	-	133	188	151
12.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Success rate</i>)	%	84	90	92	92	86	83	84	83,6	102	92	91	91
13.	Insidens rate DBD per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	88	96	-	-	74.8	-	-	-	115	-	-	-
14.	API (<i>Annual Paracite Index</i>) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.27	-	-	-	0.003	-	-	-	198.8	-	-	-
15.	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94	94	90	95	80.8	92	96	89	85.96	97,87	106,67	94,08
16.	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	27.90	-	-	-	26.3	-	-	-	106	-	-	-
17.	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	71	-	57	71	71	-	100	100	100	-	175	141	140,85
18.	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	71.40	-	-	-	100	-	-	-	140	-	-	-
19.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	-	85	90	95.0	-	83	95	100	-	98	106	105
20.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	70	96	97	97	96.51	89	88	97	138	93	91	100
21.	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	85.00	89	90	95	91.54	93	96	98	107.70	104.49	106.67	103
22.	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	87	92	-	-	89.7	95,7	-	-	103,1	14,02	-	-
23.	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	-	92	94	96	-	95.7	90	96	-	104	96	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	67	52	-	-	56	59	-	-	83.45	113,73	-	-
25.	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	-	-	54	54	-	-	56	69	-	-	103,70	128
26.	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	70	-	-	-	50	-	-	-	71.43	-	-	-
27.	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	70	-	-	-	85.98	-	-	-	122.8	-	-	-
28.	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
29.	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	-	86	87	88	-	100	88	100	-	116	101	114
30.	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	-	71,4	71,4	86	-	100	100	100	-	140	140	116,3
31.	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	12	-	-	-	12	-	-	-	100	-	-	-
32.	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	bulan	12	-	-	-	12	-	-	-	100	-	-	-
33.	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur	bulan	12	-	-	-	12	-	-	-	100	-	-	-

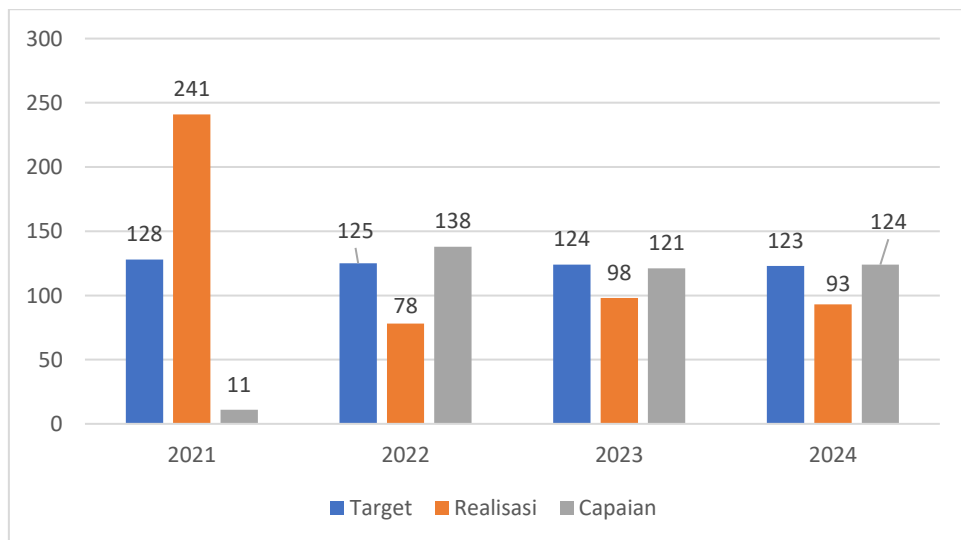
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	Laporan	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-	-
35.	Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	Bulan	12	-	-	-	12	-	-	-	100	-	-	-
36.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	-	-	-	5	-	-	-	100	-	-	-
37.	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
38.	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
39.	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	-
40.	Akuntabilitas Kinerja	%	-	-	-	77	-	-	-	77,7	-	-	-	101

*Sumber : Data Target dan Realisasi LKPJ Tahun 2015-2024

Selanjutnya penjelasan dari Evaluasi Pencapaian Kinerja pada Tabel 2.11. dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

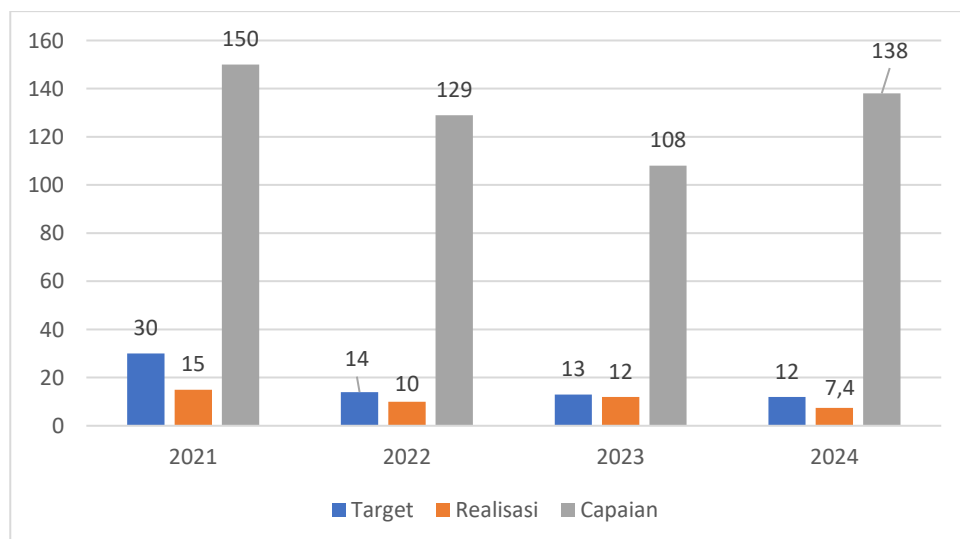
a. Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Angka kematian ibu menunjukkan *tren* fluktuatif. Pada tahun 2021, AKI mencapai 241 per 100.000 kelahiran hidup dan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2024, angkanya masih tergolong tinggi (93/100.000 KH pada tahun 2024). Ketimpangan wilayah juga masih menjadi persoalan serius, terutama di Kabupaten Lingga yang mencatat AKI ekstrem mencapai 588/100.000 KH. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses layanan kesehatan maternal, terutama di wilayah kepulauan terpencil. Penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan (47%) dan hipertensi. Adapun rekomendasi dalam penurunan AKI antara lain memperluas cakupan layanan kesehatan ibu dan bersalin yang berkualitas, terutama di daerah dengan geografis sulit, menyediakan transportasi rujukan yang terintegrasi dan cepat (ambulans laut/udara) dan meningkatkan distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis, seperti dokter kebidanan dan kandungan (*obsgyn*) dan bidan terlatih di seluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 5
Capaian Angka Kematian Ibu (AKI)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi (AKB) kembali meningkat menjadi 7,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Meskipun jumlah absolut kematian bayi menurun, tetapi rasio kematian kembali naik, yang menandakan permasalahan dalam cakupan atau efektivitas pelayanan. Meskipun penurunan kasus tercatat di beberapa daerah, secara keseluruhan AKB meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelayanan neonatal dan pemantauan kesehatan bayi. Adapun rekomendasi dalam penurunan AKB yaitu perluasan layanan pemantauan neonatal dan kunjungan rumah pascapersalinan untuk bayi risiko tinggi, penguatan program imunisasi dasar lengkap dan pemberian vitamin A serta suplementasi zat gizi penting lainnya dan penguatan pencatatan dan pelaporan kematian bayi berbasis komunitas dan fasilitas kesehatan. Data target dan realisasi capaian tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

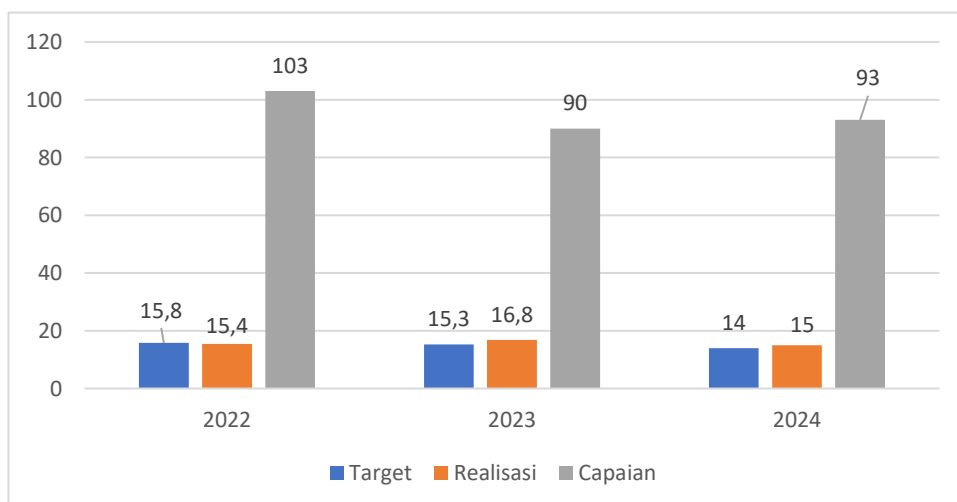


Gambar 2. 6
Capaian Angka Kematian Bayi (AKB)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021 tercatat prevalensi *underweight* sebesar 13,4%. Tantangan utama adalah belum optimalnya cakupan penimbangan balita dan keterbatasan alat ukur standar (antropometri) di posyandu, serta masih rendahnya edukasi kepada orang tua mengenai pola makan dan gizi seimbang. Adapun rekomendasi dalam penurunan prevalensi *underweight* antara lain pengadaan dan distribusi alat antropometri standar ke seluruh posyandu, pelatihan kader posyandu untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan pemantauan tumbuh kembang

anak dan kembangkan program edukasi dan komunikasi perubahan perilaku gizi yang berbasis budaya lokal.

Pada indikator kinerja prevalensi stunting mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali meningkat dan stagnan kembali di angka 16,8% dan 15% pada tahun 2023–2024. Angka ini belum mencapai target provinsi sebesar 14%, meskipun sudah mendekati target nasional (16%). Kabupaten Bintan dan Lingga mencatat prevalensi stunting tertinggi (>20%), mengindikasikan adanya ketimpangan antar wilayah. Adapun rekomendasi dalam penurunan stunting yaitu laksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui pendekatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), termasuk pendampingan ibu hamil dan edukasi ASI eksklusif; Perbaiki sanitasi dan akses air bersih untuk mencegah infeksi berulang pada anak yang dapat menyebabkan gizi buruk; dan lakukan validasi data balita stunting setiap bulan dengan melibatkan lintas sektor (pendidikan, sosial, desa). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 7
Capaian Prevalensi Stunting
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

b. Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan yang

mana capaian SPM Bidang kesehatan setiap tahunnya sebesar 100% dengan status sangat tinggi seperti yang tertera pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 8
Persentase Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

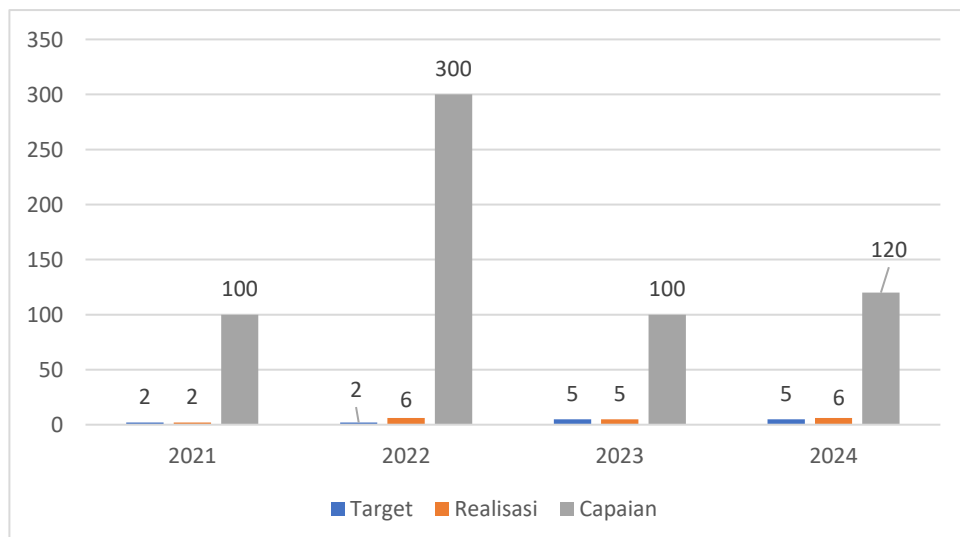
Untuk data capaian persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan tidak tersedia di tahun 2021 karena indikator kinerja tersebut baru ditambahkan mulai tahun 2022. Jika dilihat data capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah tercapai semuanya (100%), artinya semua masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada kondisi kejadian luar biasa sudah tertangani dengan baik dan mendapatkan layanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 9
Persentase Warga Negara Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

c. Kesehatan Lingkungan

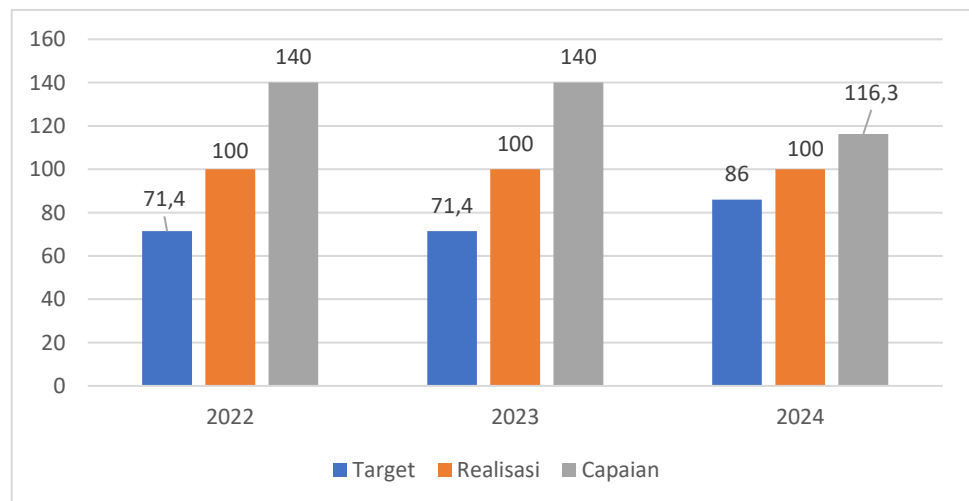
Pada tahun 2021 semua kabupaten/kota sudah melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), namun belum semua menyusun dokumen pendukung. Kurangnya pelaporan lanjutan di tahun berikutnya menunjukkan perlu adanya penguatan dalam monitoring dan evaluasi program lintas sektor. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan laporan kinerja (LAKIP/LKjIP) tahun 2021 hingga 2024, masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu segera ditangani agar target pembangunan kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun nasional, dapat tercapai secara berkelanjutan Adapun rekomendasi dalam pelaksanaan KKS yaitu evaluasi dan pemetaan ulang status pelaksanaan KKS per kabupaten/kota secara berkala; Bentuk tim koordinasi lintas OPD dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KKS secara lebih substansial; dan tingkatkan kapasitas kelembagaan Forum KKS dan integrasikan dengan program prioritas lainnya seperti GERMAS. Data target dan realisasi capaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 10
Capaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

d. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat terdapat 2 Indikator Program, salah satunya Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Germas menjadi indikator program dimulai dari tahun 2022. Adapun capaian indikator program germas sudah memperoleh status sangat tinggi setiap tahunnya dengan rincian tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 140%, tahun 2023 realisasi kinerja mencapai 140% dan tahun 2024 realisasi kinerja mencapai 116,3%. Walaupun status indikator capaian sangat tinggi tetapi terjadi penurunan realisasi kinerja pada tahun 2024, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah target sedangkan realisasi setiap tahun tetap sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 11
Capaian Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

e. Pengendalian Penyakit

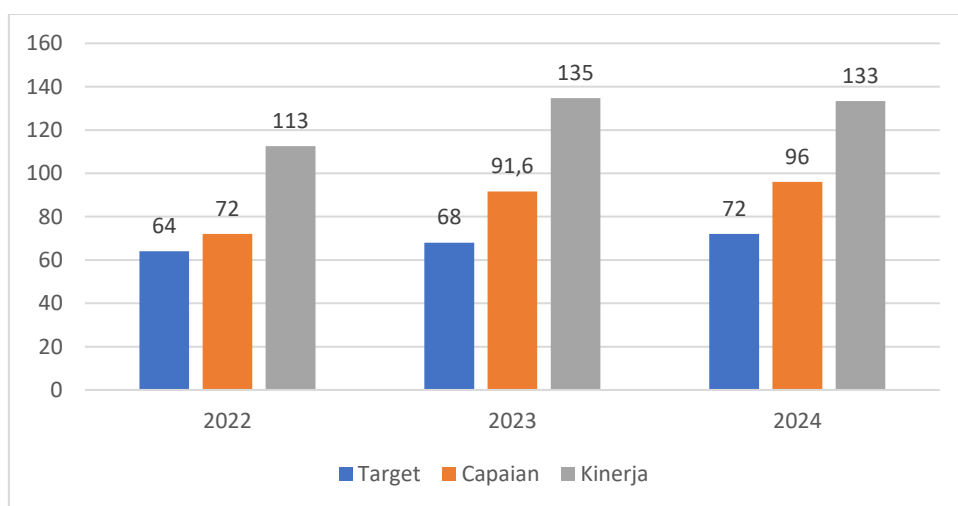
1) Penyakit Menular

Pada tahun 2021 data capaian prevalensi HIV sebesar <0,5%. Angka ini sudah mencapai target kinerja sebesar <0,5 dengan rasio capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi), namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan beberapa indikator kinerja program dan salah satu indikator kinerja yang tidak digunakan lagi adalah prevalensi HIV.

Selain itu juga, ditahun 2021 diperoleh data angka capaian Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB sebesar 195 per 100,000

penduduk. Angka ini sudah diatas target kinerja sebesar 175 per 100,000 penduduk dengan rasio capaian kinerja sebesar 112% (kategori sangat tinggi), namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan beberapa indikator kinerja program, dan salah satu indikator kinerja yang tidak digunakan lagi adalah Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100,000 penduduk.

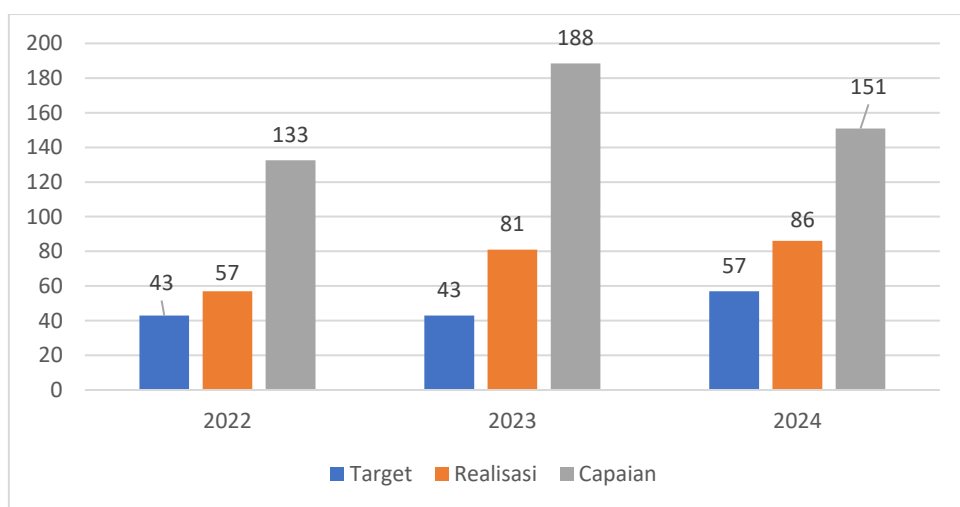
Untuk data capaian ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV tidak tersedia di tahun 2021 karena indikator kinerja tersebut baru ditambahkan mulai tahun 2022. Jika dilihat data capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, dimana pada tahun 2022 dari target sebesar 64% diperoleh capaian sebesar 72% dengan rasio capaian kinerja program sebesar 113% (kategori sangat tinggi). Sedangkan tahun 2023 target naik menjadi sebesar 68% dengan capaian sebesar 91,6% sehingga didapatkan rasio capaian kinerja sebesar 135% (kategori sangat tinggi). Pada tahun 2024 target naik menjadi sebesar 72% dengan capaian sebesar 96%, dan didapatkan rasio capaian kinerja sebesar 133% (kategori sangat tinggi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 12
Capaian ODHA yang mendapatkan ARV
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Data capaian Eliminasi malaria juga tidak tersedia di tahun 2021 karena indikator kinerja tersebut baru ditambahkan mulai tahun 2022. Jika dilihat data capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, dimana pada tahun 2022 dari target

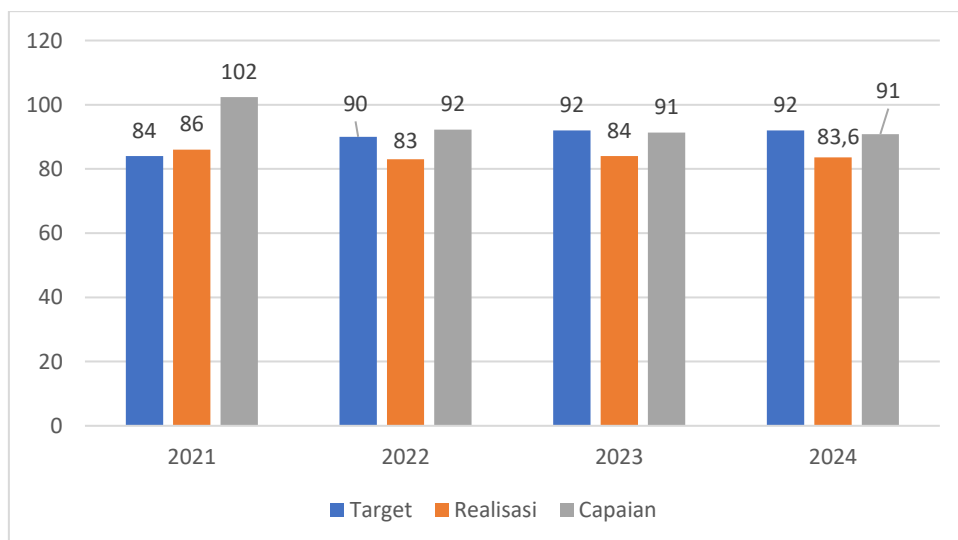
sebesar 43% diperoleh capaian sebesar 57% dengan rasio capaian kinerja program sebesar 133% (kategori sangat tinggi). Sedangkan tahun 2023 target tetap sebesar 43% dengan capaian meningkat menjadi sebesar 81% sehingga didapatkan rasio capaian kinerja sebesar 188% (kategori sangat tinggi). Pada tahun 2024 target naik menjadi sebesar 57% dengan capaian sebesar 86%, dan didapatkan rasio capaian kinerja sebesar 151% (kategori sangat tinggi). Data target dan realisasi capaian Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota) tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 13
Capaian Eliminasi Malaria (Kabupaten/Kota)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Angka keberhasilan pengobatan TB (*Success rate*) dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif. Jika dilihat data ditahun 2021 capaian *success rate* belum mencapai target nasional program TBC sebesar 84%, hal ini dikarenakan pengaruh dari pandemi Covid-19 sehingga capaian *success rate* mengalami penurunan yaitu sebesar 79%. Dan pada tahun 2022 mulai meningkat pada angka capaian sebesar 81%, pada tahun 2023 capaian TBC *success rate* mengalami peningkatan pada angka 83,68%, akan tetapi di tahun 2024 mengalami penurunan capaian TBC *success rate* sebesar 81%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan sesuai waktu yang telah ditentukan, ketidakteraturan pasien dalam menjalani pengobatan, akibat kurangnya dukungan dr pihak keluarga, masih adanya stigma terhadap pasien TBC sehingga

menyebabkan adanya diskriminasi dalam masyarakat, dan lamanya pengobatan TBC (6-24 bln) menyebabkan terjadinya efek samping obat dan berpotensi terjadi putus berobat. Data target dan realisasi capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 14
Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(*Success Rate*) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021, data angka capaian Insidens rate DBD sebesar 74,8 per 100,000 penduduk. Angka tersebut berada dibawah target kinerja sebesar 88 per 100,000 penduduk dengan rasio capaian kinerja sebesar 115% (kategori sangat tinggi), hal ini dikarenakan indikator tersebut bersifat *progress* negatif artinya indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan beberapa indikator kinerja program, dan salah satu indikator kinerja yang tidak digunakan lagi adalah Insidens rate DBD per 100,000 penduduk.

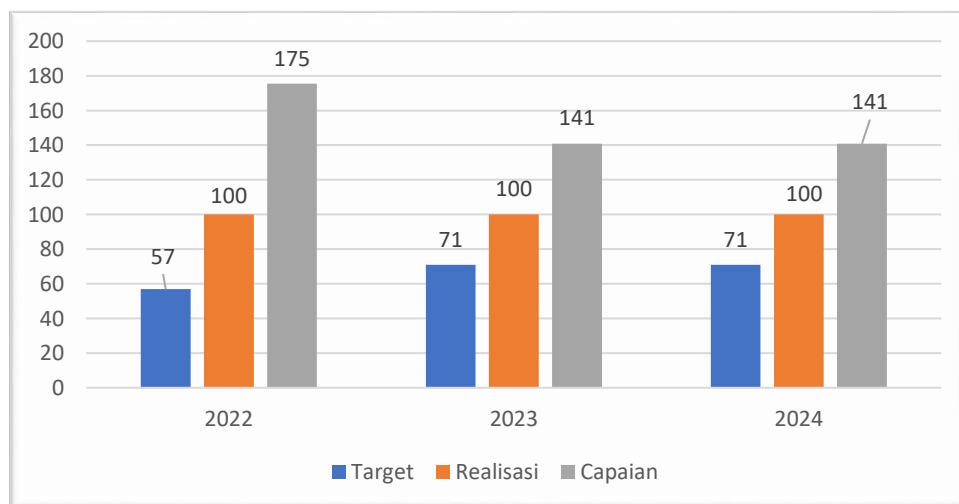
Selanjutnya data angka capaian API (Annual Paracite Incidence) pada tahun 2021 sebesar 0,003 per 1,000 penduduk, angka tersebut berada dibawah target kinerja sebesar 0,27 per 1,000 penduduk dengan rasio capaian kinerja sebesar 198,8 per 1,000 penduduk (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik karena indikator bersifat *progress* negatif. Namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan beberapa indikator kinerja program dan salah satu indikator

kinerja yang tidak digunakan lagi yaitu API (Annual Paracite Incidence) per 1,000 penduduk.

2) Penyakit Tidak Menular

Pada tahun 2021 data capaian prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 26,3%, angka tersebut berada dibawah target kinerja sebesar 27,90% dengan rasio capaian kinerja sebesar 106% (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik karena indikator bersifat *progress* negatif. Namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan beberapa indikator kinerja program, dan salah satu indikator kinerja yang tidak digunakan lagi adalah prevalensi tekanan darah tinggi.

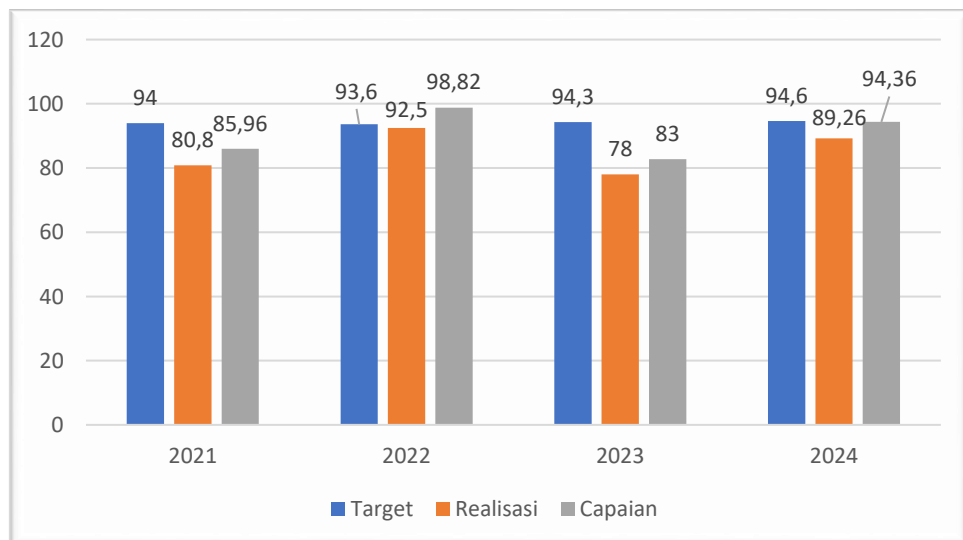
Data capaian jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas tidak tersedia di tahun 2021 karena indikator kinerja tersebut baru ditambahkan mulai tahun 2022. Jika dilihat data capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah tercapai semuanya (100%), bahkan melebihi target. Dikatakan capaian 100% jika kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 15
Capaian Melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

f. Imunisasi

Data capaian persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif. Jika dilihat bahwa realisasi cakupan IDL tahun 2024 sebesar 89,26%. Jika dibandingkan dengan capaian IDL tahun 2023 yakni sebesar 78%, maka capaian IDL tahun 2024 mengalami peningkatan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan imunisasi di lapangan masih ditemukan berbagai kendala yang perlu diantisipasi ke depannya, diantaranya kondisi aplikasi ASIK yang belum running well dan kondisi sinyal internet di daerah yang belum semuanya baik/lancar; Masih ada penolakan dari masyarakat terhadap imunisasi, termasuk penolakan terhadap Suntikan Ganda; Banyaknya aplikasi yang juga harus dikerjakan oleh petugas imunisasi/bidan di puskesmas; dan Koordinasi antara petugas imunisasi dan Kesga di lapangan kurang maksimal, Tugas ganda dari Petugas Imunisasi di puskesmas selain sebagai penanggungjawab program imunisasi serta kurangnya dukungan Lintas Sektor/Program di daerah. Data target dan realisasi capaian Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

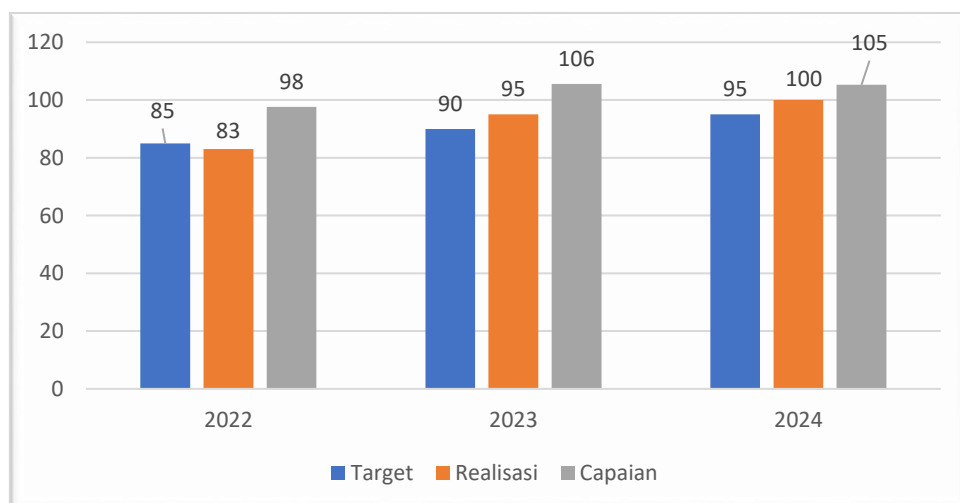


Gambar 2. 16
Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

g. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2017-2021 capaian kinerjanya 100% dengan status sangat tinggi yang mana di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Riau sudah memiliki minimal 1 (satu) Rumah Sakit terakreditasi.

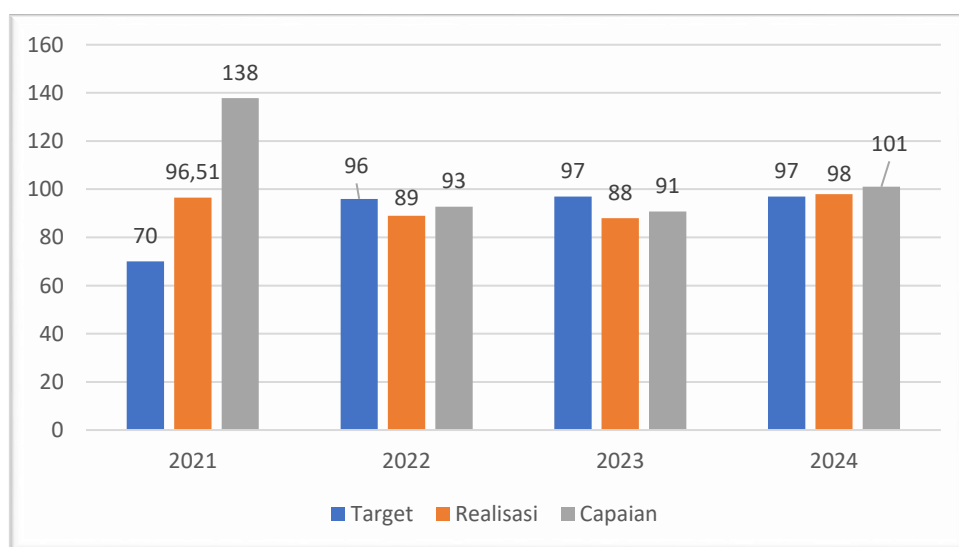
Data capaian persentase Rumah Sakit terakreditasi tidak tersedia di tahun 2021 karena indikator kinerja tersebut baru ditambahkan mulai tahun 2022. Data capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif, dimana jika dilihat realisasi capaian tahun 2022 sebesar 83%, kemudian terjadi peningkatan realisasi capaian tahun 2023 yakni sebesar 95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 17
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Sedangkan data capaian persentase Puskesmas terakreditasi dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif. Jika dilihat data ditahun 2021 realisasi capaian persentase Puskesmas terakreditasi sudah mencapai target sebesar 96,51% bila dibandingkan dengan target sebesar 70%, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan realisasi capaian sebesar 89% bila dibandingkan dengan target sebesar 96%. Dan terjadi penurunan kembali realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 88% bila dibandingkan dengan target sebesar 97%. Akan tetapi di tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi capaian sebesar 98% bila

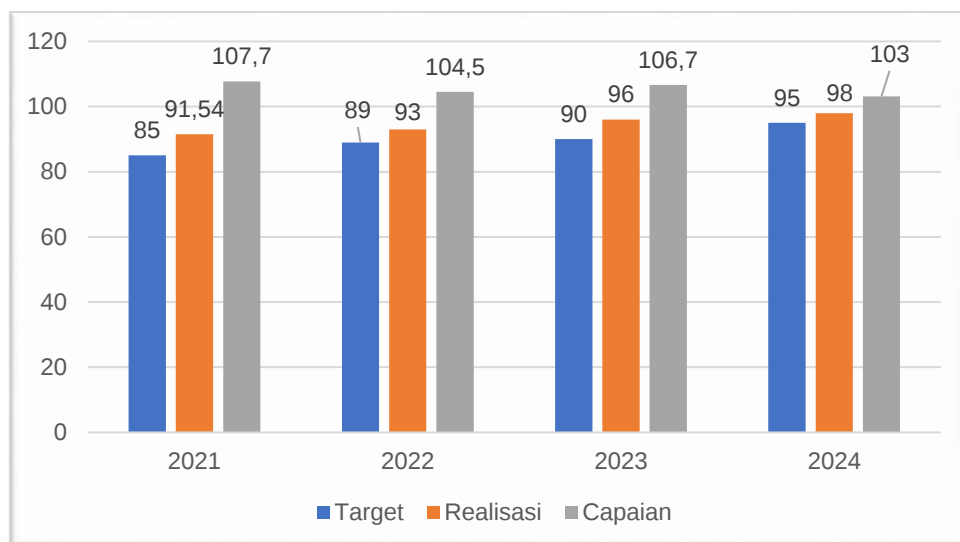
dibandingkan dengan target sebesar 97%. Data capaian Puskesmas terakreditasi diperoleh dari seluruh jumlah Puskesmas yang tersebar di 7 kabupaten/kota yang teregistrasi dan telah terakreditasi dengan status akreditasi paling rendah status kelulusan Dasar. Data target dan realisasi capaian Persentase Puskesmas Terakreditasi tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 18
Persentase Puskesmas Terakreditasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024

h. Pelayanan Jaminan Kesehatan

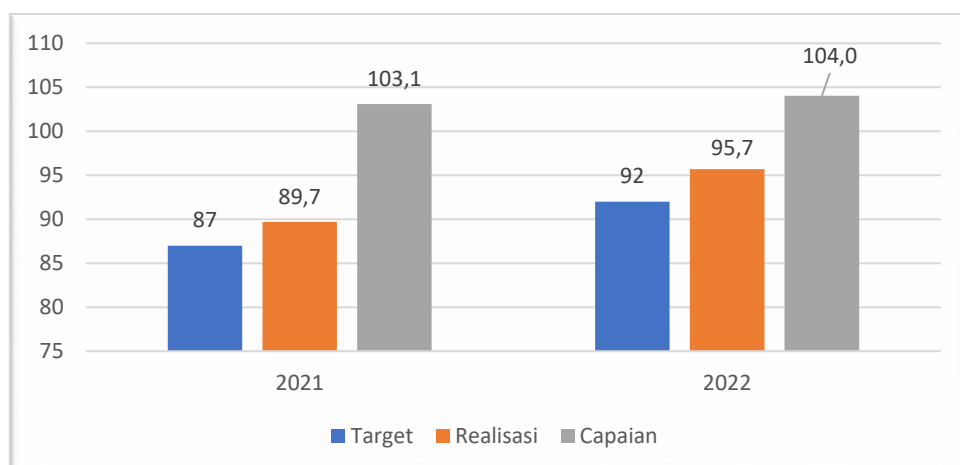
Capaian kepemilikan JKN/KIS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni dari 91,54% (2021), 93% (2022), 96% (2023) dan 98% (2024) melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 90%. Ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengintegrasian penduduk ke dalam sistem JKN serta dukungan dari anggaran Pajak Rokok. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pelaksanaan JKN serta ketidakvalidan data penduduk yang menjadi kendala dalam integrasi data NIK. Data target dan realisasi capaian Persentase Penduduk Dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 19
Persentase Penduduk Dengan Kepemilikan Jaminan
Kesehatan Nasional/KIS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-
2024

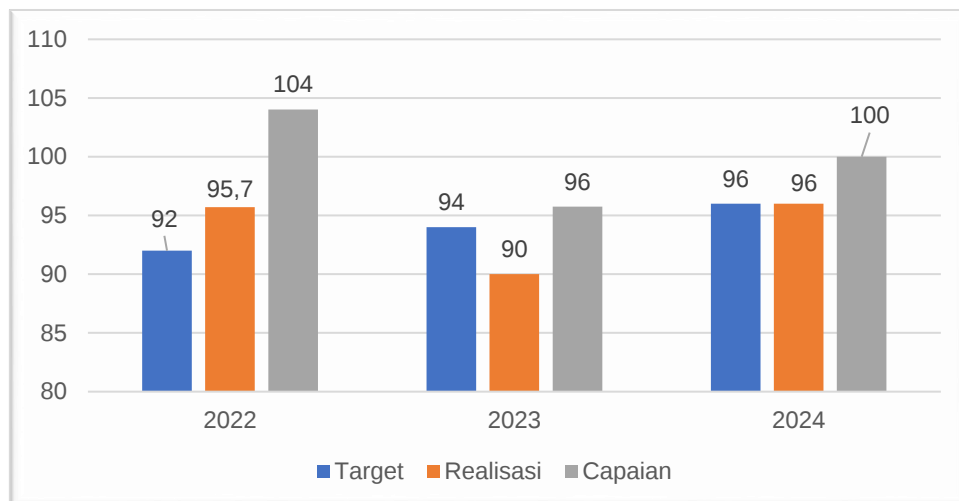
i. Kefarmasian

Tingkat ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar menunjukkan capaian yang cukup baik dengan rasio realisasi melebihi target: 89,7% (2021) dan 95,7% (2022) dari target 87% dan 92%. Peningkatan ini didukung oleh sistem pengadaan dan distribusi yang mulai memanfaatkan digitalisasi. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran daerah dan geografis wilayah kepulauan yang mempersulit distribusi saat kondisi cuaca buruk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



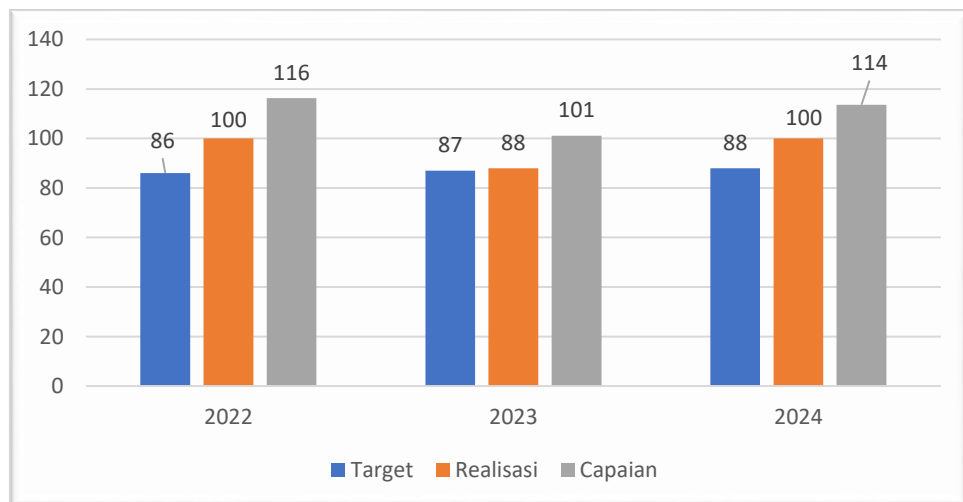
Gambar 2. 20
Persentase Ketersediaan Obat di Pelayanan Kesehatan Dasar
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Masih ditemukan Puskesmas yang tidak memenuhi 100% ketersediaan obat esensial. Hambatan utama meliputi kekosongan jenis obat tertentu, keterbatasan anggaran pengadaan, dan regulasi yang belum seimbang antara kebutuhan dengan program penyediaan obat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 21
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Berdasarkan gambar terlihat bahwa realisasi indikator pada tahun 2022–2024 secara konsisten berada di atas target. Pada 2022, target 86 terealisasi sebesar 100 dengan capaian 116% dari target. Tahun 2023 menunjukkan kondisi relatif stabil, dengan target 87 dan realisasi 88 sehingga capaian tercatat 101%. Sementara itu, pada 2024 target 88 terealisasi 100 dengan capaian 114%. Secara rata-rata, capaian selama tiga tahun mencapai 110,3% dari target, yang mengindikasikan kinerja program berada pada kategori sangat baik.

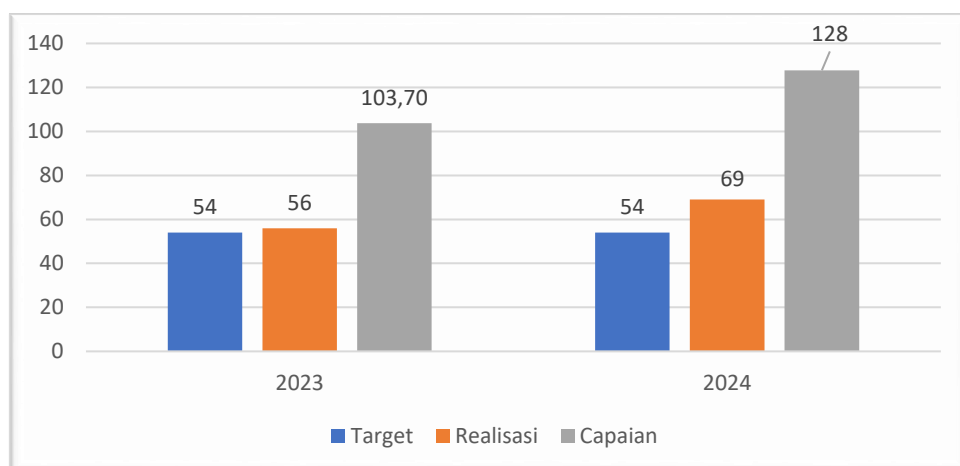


Gambar 2. 22
Persentase Sarana Distribusi Farmasi Cabang Yang Sesuai
Standar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

j. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Capaian tahun 2021 dan 2022 terhadap pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan stagnan di angka 56% dan 56,32%, di bawah target yang ditetapkan yaitu 67%. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 serta kesulitan distribusi dan rekrutmen tenaga kesehatan di daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Pada tahun 2023, indikator ini mulai diterapkan menggantikan indikator sebelumnya, dengan capaian 56% dari target 54%. Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan melalui berbagai program seperti pengangkatan Non-ASN, program Nusantara Sehat, dan rekrutmen CPNS/PPPK, meskipun masih terkendala oleh pensiun, mutasi, dan kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 23
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan
Sesuai Standar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Tahun 2021 hanya 50% RS Kelas C yang memenuhi indikator ini, dan meningkat menjadi 73,68% pada 2022. Namun, pencapaian tahun 2023 masih rendah (40%) dari target 80%. Ketersediaan tenaga dokter spesialis menjadi isu utama, terutama di daerah dengan minat rendah meskipun sudah diberikan insentif. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan beasiswa afirmatif menjadi upaya untuk mengatasi hal ini.

Kebutuhan akan tenaga tersertifikasi di area khusus sangat penting dalam mendukung pelayanan rujukan dan penanganan kasus-kasus kritis. RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSJKO Engku Haji Daud tengah mengembangkan layanan dan pelatihan SDM Kesehatan. RSJKO Engku Haji Daud telah ditetapkan sebagai RS rujukan utama untuk pelayanan kesehatan jiwa. Untuk mendukung transformasi ini, dilakukan pengembangan SDM melalui pelatihan rutin. Target peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti diklat >20 jam per tahun meningkat dari 30% menjadi 60% selama periode 2023-2026.

k. Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk data capaian 3 (tiga) indikator kinerja program penunjang yaitu pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, secara keseluruhan realisasi capaian sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebanyak 12 bulan dengan rasio capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi). Hal

ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketiga indikator kinerja tersebut sebagai bagian yang mendukung keberlangsungan program penunjang urusan pemerintahan.

Selain itu, untuk jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun hanya tersedia capaian data di tahun 2021 sebanyak 2 (dua) laporan sesuai target realisasi kinerja mencapai 100% (2 laporan).

Data/Informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik, dengan capaian di tahun 2021 adalah 12 bulan sesuai target realisasi kinerja mencapai 100% (12 bulan), penyampaian informasi dan pelayanan publik melalui situs web Dinas Kesehatan dan media sosial. Tersedianya profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu sarana yang memuat berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan tingkat pencapaian Provinsi Kepulauan Riau Sehat dan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan secara lengkap. Tahun 2022-2024 indikator ini tidak lagi termasuk kedalam indikator program.

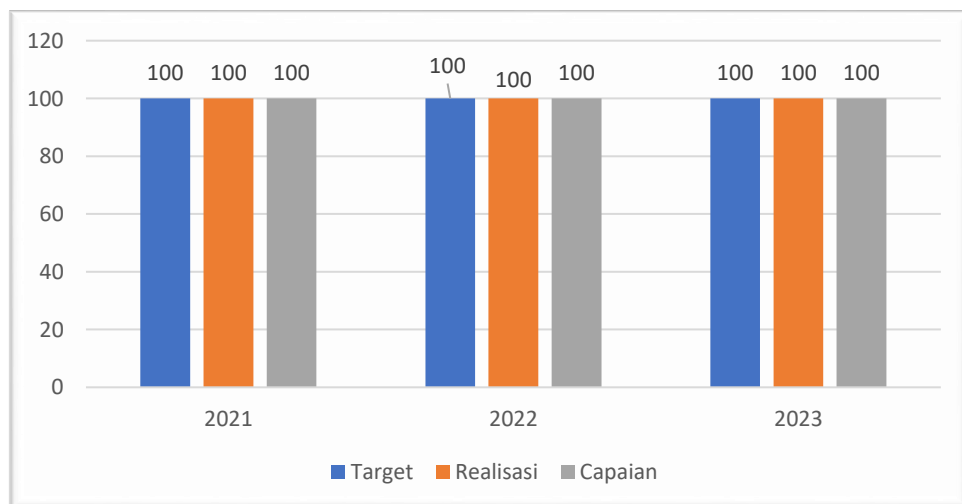
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun, target 2021 adalah 5 dokumen dengan realisasi kinerja 100% (5 dokumen), tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, tersusunnya Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2022-2024 indikator ini tidak lagi termasuk kedalam indikator program.

Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan, target 2021 adalah 100% dan capaian kinerja 100% yaitu DPA pada anggaran APBD dan DIPA pada anggaran dekonsentrasi. Dalam penyusunan dokumen dan anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diperlukan beberapa tahapan yaitu pelaksanaan forum OPD, musrenbang, musrenbangnas, rakontekrenbang hingga pembahasan anggaran dengan mitra kerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan anggaran dekonsentrasi juga diperlukan beberapa tahapan dalam pembahasan dengan Kementerian Kesehatan tim APIP.

Tahun 2022-2024 indikator ini tidak lagi termasuk kedalam indikator program.

Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik pada tahun 2021 dengan target 100% dan capaian 100%, nilai ini menunjukkan bahwa PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai sasaran kerjanya dan perilaku kerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian ini penting untuk menentukan kenaikan pangkat, jabatan, dan tunjangan kinerja PNS. Tahun 2022-2024 indikator ini tidak lagi termasuk kedalam indikator program.

Indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dengan target 2021-2024 adalah 100% dan capaian 100%, bahwa pelayanan administrasi kantor telah berjalan dengan tertib dan lancar dalam Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 2. 24
Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Akuntabilitas Kinerja, target 2024 adalah 77% dengan capaian 77,7%, ketercapaian target tersebut merupakan keberhasilan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan

Pelaporan Kinerja. Indikator ini menjadi indikator program baru di tahun 2024.

2.1.7 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

1. Masyarakat umum

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari seluruh program dan layanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Dinas Kesehatan melalui berbagai kegiatan seperti kampanye gaya hidup sehat, imunisasi, layanan kesehatan dasar, dan program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini juga mencakup peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

2. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan

Kelompok ini mencakup tenaga medis, paramedis, serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk didalamnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan memberikan dukungan berupa pelatihan, pengembangan kompetensi, peningkatan mutu layanan, penyediaan sarana-prasarana, serta sistem rujukan dan manajemen informasi kesehatan. Layanan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas SDM dan sistem pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan berstandar.

3. Kelompok rentan dan berisiko tinggi

Termasuk di dalamnya adalah ibu hamil, bayi dan balita, lansia, remaja, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program intervensi spesifik dan sensitif seperti penurunan stunting, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), serta pelayanan kesehatan jiwa dan

rehabilitasi. Layanan diberikan secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.

4. Pemangku kepentingan lintas sektor

Dinas Kesehatan juga berinteraksi dengan mitra kerja seperti perangkat daerah lain, lembaga pendidikan, organisasi profesi dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian indikator pembangunan kesehatan daerah.

2.1.8 Mitra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan daerah dan meningkatkan efektivitas intervensi program-program prioritas.

1. Perangkat Daerah Terkait

Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya, seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penghubung dan Biro Umum. Kolaborasi ini mendukung pelaksanaan program lintas sektor, seperti penanggulangan stunting, kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan di sekolah, masyarakat rentan, serta pengelolaan rumah singgah di Jakarta dan Batam.

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kemitraan dilakukan dengan puskesmas, rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan, dan fasilitas lainnya baik milik pemerintah maupun swasta. Kerja sama ini mendukung pelaksanaan layanan primer hingga rujukan, serta memperkuat jejaring pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

3. Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Yayasan /Lembaga Terkait Kesehatan

Dinas Kesehatan bermitra dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IBI, dan IAI, dan sebagainya, serta perguruan tinggi bidang kesehatan seperti Poltekkes, Universitas untuk peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan pelatihan teknis, penelitian, dan pengembangan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat seperti Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Komisi Perlindungan AIDS dan sebagainya.

4. Kader Kesehatan Masyarakat

Kader Posyandu, kader Jumantik, dan kader kesehatan lainnya menjadi mitra utama di tingkat komunitas dalam menjalankan fungsi edukasi, deteksi dini, pemantauan lingkungan, dan rujukan masyarakat kepada layanan kesehatan formal. Peran kader sangat penting dalam program-program seperti penurunan stunting, pemberantasan penyakit berbasis vektor, serta promosi kesehatan berbasis keluarga.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Lokal

Kemitraan dengan LSM dan kelompok masyarakat mendorong partisipasi aktif dalam edukasi kesehatan, pendampingan kelompok rentan, serta advokasi kesehatan masyarakat. Kerja sama ini memperluas jangkauan program kesehatan hingga ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

6. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Dunia usaha berperan dalam mendukung pembangunan kesehatan melalui program CSR, penyediaan sarana kesehatan, serta implementasi program kesehatan kerja dan lingkungan. Peran serta swasta memperkuat sumber daya dan inovasi dalam sistem pelayanan.

7. Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Pusat

Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Pelatihan Kesehatan, serta instansi vertikal lainnya mendukung harmonisasi pelaksanaan program pusat dan daerah, pendanaan layanan, dan penerapan regulasi nasional.

2.1.9 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, tidak terdapat BUMD yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.10 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Program Kegiatan Kerjasama Berdasarkan Strategi Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai mitra kerja sama dengan beberapa Rumah sakit baik dildalam maupun diluar Provinsi Kepulauan Riau seperti Provinsi Kalimantan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara dalam hal Jaminan Kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan kerjasama dengan beberapa instansi berikut, yaitu :

Tabel 2. 12
Kerjasama Daerah dengan Dinas Kesehatan

OPD PENGAMPU	NAMA KERJA SAMA	MITRA KERJA SAMA	PROGRAM	KEGIATAN
Dinas Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau	1. RS Awal Bros (Batam)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		2. RSBP (Batam)		
		3. RS Harapan Bunda (Batam)		
		4. RS Budi Kemuliaan (Batam)		
		5. RS Soedarsono Darmosoewito (Batam)		
		6. RS Polda Bhayangkara (Batam)		
		7. RS HJ. Bunda Halimah (Batam)		
		8. RS Graha Hermine (Batam)		
		9. RSIA Griya Medika (Batam)		
		10. RS Elisabeth Batam Kota (Batam)		
		11. RS Elisabeth Lubuk Baja (Batam)		
		12. RS Elisabeth Sei Lekop (Batam)		
		13. RS Awal Bros Botania (Batam)		
		14. RSJ Tampan (Pekanbaru)		
		15. RSUD Arifin Ahmad (Pekanbaru)		
		16. RSUP H.Adam Malik (Medan)		
		17. RS Vina Estetika (Medan)		
		18. RSUP M.Djamil (Padang)		
		19. RSUP Kanker Dharmais (Jakarta)		
		20. RSUP Jantung Harapan Kita (Jakarta)		
		21. RSUP Cipto Mangunkusumo (Jakarta)		
		22. RSIA Harapan Kita (Jakarta)		
		23. RSUP DR.Hasan Sadikin (Bandung)		
		24. RS Pusat Mata Cicendo (Bandung)		
		25. RS Dr. Soeroso (Pontianak)		

OPD PENGAMPU	NAMA KERJA SAMA	MITRA KERJA SAMA	PROGRAM	KEGIATAN
Dinas Kesehatan	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Penyelenggara, Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau	Badan Penyelenggara, Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Nota Kesepakatan antara Dinas Kesehatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Rangka Percepatan Penurunan AKI, AKB dan Stunting	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memegang peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pembinaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih terdapat fasyankes primer dan rujukan dengan sarana, prasarana, alat kesehatan (SPA) yang kurang (belum memenuhi standar sesuai dengan tipe fasyankes);
- b. Belum terpenuhinya obat dan BMHP (bahan medis habis pakai) di fasyankes sesuai kebutuhan;
- c. Masih kurangnya kepercayaan pasien terhadap pelayanan RS sehingga lebih memilih pelayanan RS di luar negeri yang berbatasan dengan Kepulauan Riau;
- d. Sulitnya Sistem rujukan pasien antar pulau;
- e. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan;
- f. Belum terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Puskesmas;
- g. Belum semua RS tersedia tenaga spesialis sesuai standar;
- h. Meningkatnya permasalahan gizi;
- i. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
- j. Masih belum tertanggulangnya penyakit menular tertentu dan tingginya risiko penyakit tidak menular, serta krisis kesehatan, dan
- k. Menurunnya ketercapaian *Universal Health Coverage* (UHC)

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis dalam bidang kesehatan merupakan permasalahan atau potensi yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan di masa depan. Isu ini dapat berasal dari kondisi yang telah terjadi maupun prediksi tantangan ke depan jika tidak ditangani secara tepat. Di sisi lain, isu strategis juga mencerminkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan daerah. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti forum diskusi terfokus (FGD), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Adapun isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau termasuk juga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan

1. Pelaksanaan transformasi kesehatan berbasis Kepulauan
Karakteristik geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan akses pelayanan kesehatan masih timpang. Transformasi kesehatan berbasis kepulauan menjadi penting agar layanan dasar dan rujukan mampu menjangkau masyarakat secara merata, melalui penguatan sarana transportasi kesehatan, pemanfaatan teknologi digital, serta jejaring pelayanan antar wilayah.
2. Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan pemenuhannya dari segi kuantitas serta kualitas
Keterbatasan tenaga kesehatan, terutama spesialis, serta distribusi yang tidak merata di wilayah terpencil dan perbatasan menyebabkan mutu layanan berbeda antar daerah. Pemerataan SDM kesehatan harus disertai peningkatan kompetensi melalui pendidikan, sertifikasi, serta penugasan khusus agar kualitas layanan tetap terjaga di seluruh wilayah.
3. Permasalahan kesehatan yang persisten
Angka stunting, kematian ibu dan bayi, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular masih tinggi di Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan permasalahan kesehatan dasar yang terus berulang dan memerlukan pendekatan komprehensif mulai dari promotif, preventif, hingga kuratif, dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat.
4. Kebutuhan peningkatan deteksi dini dan surveilans, serta penguatan respons terhadap situasi krisis kesehatan
Pandemi Covid-19 menunjukkan lemahnya kesiapan sistem kesehatan dalam deteksi dini dan penanganan krisis. Peningkatan kapasitas surveilans epidemiologi, laboratorium kesehatan, serta jejaring respons cepat darurat kesehatan menjadi strategi penting agar ancaman serupa dapat diantisipasi lebih baik di masa depan.
5. Disparitas pada sistem pelayanan kesehatan yang substansial
Ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM di fasilitas kesehatan masih tidak merata sehingga terjadi disparitas mutu layanan antar kabupaten/kota. Hal ini berpengaruh pada capaian indikator kesehatan yang berbeda jauh antar wilayah. Upaya standardisasi,

akreditasi, dan pembinaan berjenjang menjadi langkah untuk memperkecil kesenjangan ini.

6. Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan siklus hidup

Pelayanan kesehatan untuk ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia masih belum terintegrasi dengan baik. Tantangan utama terletak pada kontinuitas layanan sepanjang siklus hidup agar tidak terjadi lost to follow-up, sehingga perlu penguatan program *continuum of care* berbasis keluarga dan komunitas.

7. Potensi pengembangan health tourism melalui integrasi pelayanan kesehatan tradisional serta kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM pendukungnya

Lokasi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia memberi peluang besar untuk pengembangan wisata kesehatan. Dengan mengintegrasikan layanan kesehatan modern dan tradisional, melibatkan swasta, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendukung, Kepri berpotensi menjadi destinasi regional bagi pelayanan kesehatan sekaligus wellness tourism.

b) RSUD Raja Ahmad Tabib

1. Pengembangan Layanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Ibu dan Anak (KJSU–KIA)

Sebagai rumah sakit rujukan provinsi, RSUD Raja Ahmad Tabib perlu memperkuat layanan KJSU–KIA sesuai arah transformasi kesehatan nasional. Hal ini mendukung upaya penurunan beban penyakit katastropik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berobat di dalam daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pada rumah sakit luar negeri.

2. Pengembangan Layanan Radioterapi

Radioterapi menjadi layanan vital dalam penanganan kanker, namun saat ini layanan tersebut masih sangat terbatas di Kepulauan Riau. Pengembangan layanan ini di RSUD Raja Ahmad Tabib akan memperpendek akses rujukan pasien kanker, menekan biaya

pengobatan ke luar daerah, serta meningkatkan kapasitas provinsi dalam penanganan penyakit degeneratif.

c) RSJKO Engku Haji Daud

1. Penguatan jejaring layanan rujukan jiwa antar kabupaten/kota dengan RSJKO Engku Haji Daud sebagai pusat rujukan
Permasalahan kesehatan jiwa di daerah semakin meningkat, sementara jejaring rujukan belum optimal. RSJKO Engku Haji Daud perlu diperkuat sebagai pusat rujukan provinsi dengan sistem koordinasi antar kabupaten/kota, sehingga penanganan kasus jiwa dapat dilakukan lebih cepat, terintegrasi, dan sesuai standar pelayanan nasional.
2. Menjadikan RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit pendidikan utama khusus layanan kejiwaan
Ketersediaan tenaga ahli jiwa masih terbatas, sehingga RSJKO Engku Haji Daud berpotensi dikembangkan sebagai rumah sakit pendidikan utama. Dengan demikian, selain melayani pasien, RSJKO Engku Haji Daud juga berperan dalam menghasilkan tenaga kesehatan jiwa yang kompeten, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kejiwaan untuk jangka panjang

Tabel 2. 13
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
			Global	Nasional	Regional	
Dinas Kesehatan						
Posisi strategis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan internasional	Akses pelayanan kesehatan antar pulau belum merata	Kesehatan masyarakat pesisir, stunting, sanitasi, dan air bersih	Perubahan iklim, pandemi, penyakit emerging	Transformasi sistem kesehatan dan UHC	Kerja sama kesehatan lintas batas	Pelaksanaan transformasi kesehatan berbasis kepulauan
Ketersediaan tenaga kesehatan dengan potensi penguatan distribusi dan kompetensi	Distribusi dan kualitas SDM kesehatan belum optimal	Kesenjangan SDM di daerah terpencil dan kepulauan	Standar global kompetensi tenaga kesehatan	Penetapan standar tenaga kesehatan minimal	Program penugasan tenaga kesehatan	Pemerataan SDM kesehatan dari segi kuantitas dan kualitas
Program prioritas nasional bidang kesehatan (AKI, AKB, stunting, PTM, penyakit menular)	Masih tingginya kasus kesehatan dasar dan penyakit menular/tidak menular	Gizi masyarakat, kesehatan ibu-anak, dan pola hidup sehat	SDGs bidang kesehatan	Target RPJMN bidang kesehatan	Pencapaian indikator kesehatan provinsi	Permasalahan kesehatan yang persisten
Sistem surveilans dan respons krisis kesehatan	Deteksi dini dan surveilans kesehatan belum optimal	Kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit	Agenda global keamanan kesehatan (global health security)	Kebijakan nasional surveilans dan deteksi dini	Keterbatasan kapasitas deteksi dan laboratorium	Kebutuhan peningkatan deteksi dini dan surveilans, serta penguatan respons krisis kesehatan
Jejaring sistem pelayanan kesehatan provinsi dan kabupaten/kota	Terdapat disparitas layanan kesehatan antar wilayah	Standar pelayanan kesehatan daerah	Kesetaraan akses pelayanan kesehatan	Kebijakan pemerataan sistem pelayanan kesehatan	Disparitas capaian indikator kesehatan kabupaten/kota	Disparitas pada sistem pelayanan kesehatan yang substansial

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
			Global	Nasional	Regional	
Layanan kesehatan siklus hidup (ibu, anak, remaja, lansia)	Kualitas layanan siklus hidup belum merata	Continuum of care kesehatan masyarakat	Tren global layanan maternal dan lansia	Agenda nasional continuum of care	Belum optimalnya layanan siklus hidup di daerah	Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan siklus hidup
Potensi pengembangan wisata kesehatan (health tourism)	Banyak masyarakat berobat ke luar negeri; health tourism belum berkembang	Integrasi kesehatan tradisional dan pariwisata	Tren global wellness & medical tourism	Kebijakan pengembangan wisata kesehatan	Lokasi strategis Kepulauan Riau dekat Singapura–Malaysia	Pengembangan health tourism melalui integrasi pelayanan kesehatan tradisional, kemitraan swasta, serta peningkatan kompetensi SDM pendukung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Pembangunan jangka menengah disusun untuk memberikan panduan strategis dalam mencapai visi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Dalam kerangka tersebut, perumusan tujuan dan sasaran memegang peran penting sebagai fondasi dalam penyusunan alternatif strategi pembangunan yang terukur dan realistis. Tujuan menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan sasaran menjabarkan capaian terukur yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan tujuan dan sasaran sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi instrumen utama dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan secara berkesinambungan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2025–2029, yaitu “Kepri Maju, Makmur, dan Merata” tercakup dalam bentuk 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan tujuan ini dikembangkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang searah dengan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Dengan berpedoman pada Misi ketiga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter” maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan yang akan dicapai adalah :
 - Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
 - Penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balitaDari satu tujuan ini, dikembangkan menjadi 2 sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

Sasaran 1 : Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
- Menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA)
- Meningkatkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)
- Meningkatkan persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis
- Meningkatkan proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi “utama atau lebih tinggi
- Mempertahankan Status Akreditasi Tingkat Paripurna untuk Rumah Sakit RSUD Raja Ahmad Tabib
- Mempertahankan Status Akreditasi Tingkat Paripurna untuk Rumah Sakit RSJKO Engku Haji Daud

Sasaran 2 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan.

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan capaian persentase fasyankes pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar
2. Meningkatkan Persentase Pemenuhan Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib sesuai standar
3. Meningkatkan Persentase Pemenuhan Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud sesuai standar

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan											
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,12	75,32	75,58	75,84	76,1	76,36	76,63	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	15	14,8	14,35	13,9	13,45	13	12,55	
		Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	93	92	90	88	86	84	80	
			Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH) (Angka)	8	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11,5	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	81	82	83	84	85	86	87	
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	1	3	5	7	8	10	
			Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi utama atau lebih tinggi (%)	60,45	71,01	73,26	75,51	77,75	80	82,25	
			Status Akreditasi Rumah Sakit RSUD Raja Ahmad Tabib (Nilai)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
			Status Akreditasi Rumah Sakit RSJKO	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Engku Haji Daud (Nilai)								
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Persentase Fasyankes Pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar (%)	0	52,8	53	53,5	54	54,5	55	
			Persentase Pemenuhan Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib sesuai standar (%)	37	40	43	46	49	52	55	
			Persentase Pemenuhan Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud sesuai standar (%)	0	35	40	45	50	60	65	

3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Strategi Renstra perangkat daerah merupakan rumusan arah tindakan yang bersifat jangka menengah yang disusun untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, potensi dan tantangan, serta diarahkan agar sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah. Strategi berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan sinergi antar sektor.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini :

Tabel 3. 2
Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 1 : Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas	1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan Kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat dan produktif 5. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 6. Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan kompeten Menusia yang dan berkeadilan	1. Penguatan sistem perencanaan dan pemetaan kebutuhan SDM kesehatan yang berbasis data dan kebutuhan layanan. 2. Peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan melalui pengembangan kompetensi dan kebijakan distribusi berkeadilan.

Dari tabel Strategi diatas yang mencakup pendekatan menyeluruh dalam mengelola sumber daya, merespons isu strategis, dan mengarahkan program/kegiatan menuju sasaran prioritas perlu diimplementasikan secara efektif, dengan penyusunan pentahapan yang jelas dan terukur, yang membagi proses pelaksanaan ke dalam tahapan waktu tertentu berdasarkan logika pengembangan, ketersediaan sumber daya, dan tingkat urgensi. Rencana pentahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3. 3
Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan promosi dan pencegahan berbasis pendekatan siklus hidup	Penguatan pelayanan maternal, neonatal, serta percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitive	Optimalisasi integrasi sistem rujukan dan cakupan jaminan kesehatan dengan pendekatan continuum of care	Pemantapan layanan kesehatan primer dan peningkatan keberhasilan pengobatan penyakit menular dan tidak menular	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata dengan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi
Pemutakhiran data SDM kesehatan dan pemetaan kebutuhan tenaga di seluruh fasyankes	Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pendidikan berkelanjutan	Penerapan kebijakan afirmatif dan insentif pemerataan SDM di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Penguatan kelembagaan kesehatan daerah dan pengawasan distribusi SDM secara real time	Terwujudnya SDM kesehatan yang kompeten, merata, dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di sektor kesehatan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 1 : Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas	1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan Kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat dan produktif 5. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 6. Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Kehamilan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Kehamilan, Persalinan, Nifas, Penyelenggaraan Kontrasepsi, dan Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, Standar Antropometri Anak Tahun 2010 (revisi Tahun 2020), serta Pedoman Nasional Penanggulangan Stunting. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1. Peningkatan promosi dan prevensi kesehatan 2. Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan kesehatan	1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan 2. Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil 3. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi 4. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care) 5. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama 6. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. 7. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) 8. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9. Perluasan sistem rujukan daring 10. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif 11. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
			5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, serta Pedoman Sistem Rujukan Nasional Tahun 2012 (revisi terbaru Tahun 2021). 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.		
	Sasaran 2 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	1. Penguatan sistem perencanaan dan pemetaan kebutuhan SDM kesehatan yang berbasis data dan kebutuhan layanan. 2. Peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan melalui pengembangan kompetensi dan kebijakan distribusi berkeadilan.	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, dan Pengembangan Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Profesi dan Kompetensi Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan.	3. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesehatan	1. Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integrative 2. Pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga 3. Pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan profesional. 5. Perluasan kebijakan afirmatif dan insentif untuk mendukung pemerataan distribusi SDM kesehatan, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, agar seluruh program dan kegiatan kesehatan yang dijalankan tetap konsisten, terarah, dan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara efektif dalam periode lima tahun mendatang. Berikut ini arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang dipetakan guna pelaksanaan strategi, dirincikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan

Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang terpadu mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga pasca persalinan dengan penekanan pada kualitas pelayanan dan deteksi dini risiko.

2. Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil

Meningkatkan akses dan edukasi gizi seimbang, distribusi makanan tambahan, serta pemantauan status gizi secara berkala untuk mencegah malnutrisi pada kelompok rentan.

3. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi

Mengintegrasikan upaya intervensi gizi langsung dan tidak langsung melalui sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

4. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care)

Memastikan kesinambungan layanan kesehatan dari fase prakonsepsi, kehamilan, kelahiran, masa anak, remaja, dewasa dan lanjut usia agar tidak terjadi jeda dalam pemantauan dan intervensi kesehatan.

5. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama

Meningkatkan upaya promotif dan preventif terhadap faktor risiko penyakit menular dan tidak menular melalui skrining, edukasi masyarakat, dan intervensi lingkungan.

6. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

Mengembangkan strategi intervensi kesehatan masyarakat berdasarkan hasil pemetaan risiko dan analisis situasi kesehatan lokal.

7. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Meningkatkan kapasitas puskesmas dan jejaring layanan primer sebagai ujung tombak sistem kesehatan, termasuk penguatan manajemen dan pelayanan berbasis keluarga.

8. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menjamin ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai serta peningkatan mutu pelayanan sesuai standar akreditasi.

9. Perluasan sistem rujukan daring

Mengembangkan sistem rujukan berbasis digital untuk mempercepat layanan antar fasilitas kesehatan dan meningkatkan efisiensi penanganan pasien.

10. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif

Menggagas kampanye kesehatan berbasis digital, komunitas, dan media sosial untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat.

11. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan

Memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan jumlah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

12. Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif

Pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi dalam pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan data dan analisis kebutuhan wilayah.

13. Pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga

Memastikan ketersediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal di seluruh fasilitas kesehatan termasuk penyediaan beasiswa pendidikan dokter spesialis.

14. Pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan

Pendistribusian tenaga kesehatan melalui kebijakan rotasi, insentif wilayah, dan pendekatan berbasis kebutuhan daerah.

15. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan profesional.

Mendorong tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan tersertifikas serta berkelanjutan guna menjaga kompetensi dan relevansi keilmuan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan.

16. Perluasan kebijakan afirmatif dan insentif untuk mendukung pemerataan distribusi SDM kesehatan, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Menyusun kebijakan afirmatif berupa insentif khusus, pengembangan karier, dan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan akses terbatas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

4.1.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2024 telah memberikan capaian yang signifikan, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disusun Renstra Tahun 2025–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan kesehatan ke depan. Mengingat periode tahun 2030 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan baik dalam RPJMN maupun RPJMD, maka Renstra 2025–2029 perlu memuat arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut.

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan melalui Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, maka program, kegiatan, rincian indikator kinerja, dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Secara garis besar kegiatan terkait program sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Pemeliharaan Mebel
 - e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - g. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. (Pemeliharaan ruangan)
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
- Sub Kegiatan : a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan : a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- b. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- c. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
- d. Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
- e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- f. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

- g. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- h. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- i. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
- j. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- k. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- l. Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
- m. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- n. Pengembangan Rumah Sakit
- o. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- i. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
- m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
- o. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- p. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- q. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
- r. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
- s. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
- t. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
- u. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- v. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
- w. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
- x. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Sub Kegiatan : a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan : a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Program : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
- Kegiatan : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan
- Sub Kegiatan : a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
- Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- Sub Kegiatan : a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
4. Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
- Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan : a. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
5. Program : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- Sub Kegiatan : a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- b. Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 4. 1

Teknik Merumuskan Program/kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
					Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH) (Angka)		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)		
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
					Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi utama atau lebih tinggi (%)		
					Status Akreditasi Rumah Sakit RSUD Raja Ahmad Tabib (Nilai)		
					Status Akreditasi Rumah Sakit RSJKO Engku Haji Daud (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	1.02.02.1.01.0007 - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun (Unit)	1.02.02.1.01.0024 - Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
					Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	1.02.05.1.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	
					Persentase Fasyankes Pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar (%)		
					Persentase Pemenuhan Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib sesuai standar (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud sesuai standar (%)		
					Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	1.02.02.1.01.0007 - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun (Unit)	1.02.02.1.01.0024 - Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib							
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Indeks kepuasan masyarakat di fasilitas kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib (Indeks)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Persentase)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Indeks kepuasan masyarakat di fasilitas kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib (Indeks)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Persentase)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud			
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		komprehensif dan berkualitas					
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02.0031 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provins	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02.0031 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provins	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
					Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)							
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang komprehensif dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

Perincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					520.108.745.258,14		513.580.051.685,11		501.700.955.091,11		508.395.072.502,11		536.165.202.862,11	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					385.795.304.706,83		409.058.530.153,77		410.458.388.800,77		413.941.875.890,77		437.806.279.852,77	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	385.795.304.706,83	BB	409.058.530.153,77	BB	410.458.388.800,77	BB	413.941.875.890,77	BB	437.806.279.852,77	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75	80	80		82		85		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,23	91,40	91,60		91,80		92		92,90		92,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B		B		BB		BB		BB		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,14	91,50	91,85		92		92,25		92,65		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B		B		BB		BB		BB		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	83	83		84		84		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	98,57	98,60	98,65		98,70		98,75		98,80		98,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					120.791.061.314,69		90.539.930.619,34		78.715.066.994,34		83.840.061.034,34		86.927.746.114,34	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	92	92,50	93	120.791.061.314,69	93,50	90.539.930.619,34	94	78.715.066.994,34	94,50	83.840.061.034,34	95	86.927.746.114,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	7,4	11	10		9		8		7		6,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	6,3	6,1	5,9		5,7		5,5		5,3		5,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	53,79	55	55		60		60		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0,34	0,33	0,33		0,33		0,32		0,32		0,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	6	6	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	11,8	12	15		18		20		22		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	89,26	90	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	96	97	98,90		99,20		99,30		99,40		99,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1,98	1,98	1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	0	0	1		1		2		2		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,84	88,90	89		89,20		89,30		89,50		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama	Utama	Utama		Utama		Utama		Utama		Utama		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit	Satelit	Satelit		Satelit		Satelit		Satelit		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,84	88,90	89		89,20		89,30		89,50		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					11.751.722.000,62		12.459.870.931,00		11.164.716.556,00		9.306.054.387,00		10.274.047.874,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4,27	4,28	4,28	11.751.722.000,62	4,29	12.459.870.931,00	4,29	11.164.716.556,00	4,30	9.306.054.387,00	4,30	10.274.047.874,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	80	80	85		87		89		91		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	50	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					190.757.236,00		561.656.548,00		481.002.614,00		419.344.129,00		252.785.847,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (%)	88	89	90	190.757.236,00	91	561.656.548,00	92	481.002.614,00	93	419.344.129,00	94	252.785.847,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.579.900.000,00		960.063.433,00		881.780.126,00		887.737.061,00		904.343.174,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	0	14,29	14,29	1.579.900.000,00	28,57	960.063.433,00	42,86	881.780.126,00	42,86	887.737.061,00	57,14	904.343.174,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	0	14,29	14,29		28,57		42,86		42,86		57,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					520,108,745,258.14		513,580,051,685.11		501,700,955,091.11		508,395,072,502.11		536,165,202,862.11	

4.1.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			1.02.02.1.01.0007 - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
			1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0024 - Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
			1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
			1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional 1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.1.02.02 - Pembinaan dan Pengawasan 1.02.03.1.02.03 - Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
			1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
4.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
			1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud				
5.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.1.02.0031 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
6.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
			1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)				
7.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Pada Misi ke-3 Gubernur Kepulauan Riau terdapat satu tujuan yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu tujuan 3.1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pendekatan Siklus Hidup. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat. Kesesuaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, selanjutnya diuraikan sebagai tabel berikut ini :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan									
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,1	76,36	76,63	Dinkes
2.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15	14,8	14,35	13,9	13,45	13	12,55	Dinkes
3.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	Dinkes
4.	Persentase Fasyankes Pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	52,8	53	53,5	54	54,5	55	Dinkes

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025-2029. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 29 indikator yang terdiri dari indikator Dinas Kesehatan sebanyak 19 indikator, UPT. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 indikator, RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 4 dan RSJKO Engku Haji Daud sebanyak 4 Indikator. Rincian indikator tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	DINAS KESEHATAN										
1	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	positif	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	negatif	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5	
3	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	negatif	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	negatif	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	
7	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	positif	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7	
8	Hipertensi dalam pengendalian	positif	%	11,8	12	15	18	20	22	25	
9	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	%	89,26	90	91	92	93	94	95	
10	Persentase Puskesmas terakreditasi	positif	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50	
11	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	positif	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
12	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	positif	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	positif	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3	
14	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	positif	%	88	89	90	91	92	93	94	
15	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	positif	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30	
16	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	positif	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14	
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
18	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	positif	Indeks	75	80	80	82	85	90	90	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20	
RSUD RAJA AHMAD TABIB											
1	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	positif	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	positif	%	80	80	85	87	89	91	93	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	91,14	91,50	91,85	92	92,25	92,65	93	
RSJKO ENGKU HAJI DAUD											
1	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	positif	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	
2	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	positif	%	50	55	60	65	70	75	80	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	83	83	83	84	84	85	85	
UPTD. INSTALASI FARMASI PROVINSI											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	98,57	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	
2	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	positif	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2025-2029 yang memiliki Visi **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**. Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana pembangunan jangka lima tahun yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan. Renja ini digunakan untuk memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2025 hingga 2029, dengan tahun 2030 sebagai masa transisi guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting selama 5 (lima) tahun, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
3. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran atas RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama periode lima tahun yaitu tahun 2025-2029.
4. Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Satker Bidang Kesehatan se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Renstra OPD harus memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten/Kota dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan utama yang memberikan arah pembangunan kesehatan daerah secara terukur dan berkesinambungan hingga tahun 2030. Agar implementasinya berjalan konsisten, efektif, dan selaras dengan kerangka pembangunan daerah, ditetapkan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen Acuan Utama

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2025–2029. Pelaksanaannya mengikuti arah dan periode perencanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

2. Peran Strategis Renstra

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan strategis dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029 : *Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata*. Dokumen ini memberikan kerangka yang jelas mengenai tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan, serta prioritas program dan kegiatan yang menjadi mandat Dinas Kesehatan selama lima tahun.

3. Penjabaran ke Dokumen Perencanaan Tahunan

Renstra Dinas Kesehatan merupakan turunan langsung dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Renja menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan tahunan beserta pagu indikatif yang mendukung pencapaian sasaran Renstra.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Renstra dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menilai capaian kinerja, efektivitas program, serta kesesuaian dengan target pembangunan kesehatan. Hasil evaluasi menjadi bagian integral dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan.

5. Sinkronisasi Perencanaan dengan Kabupaten/Kota dan Satker

Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta satuan kerja bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau wajib menyusun Renstra masing-masing dengan memperhatikan keterpaduan dan keselarasan terhadap dokumen:

- a. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029,
- b. RPJMD Kabupaten/Kota, serta
- c. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

Sinkronisasi ini memastikan konsistensi arah pembangunan kesehatan secara regional dan mendukung tercapainya target nasional maupun daerah.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan sistem pengendalian internal yang kuat, mekanisme evaluasi kinerja yang berkelanjutan, serta manajemen risiko yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan sistem pengendalian internal, pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang responsif berperan sebagai pilar penting dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesehatan agar berlangsung tertata, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 secara tertib dan sesuai arah kebijakan pembangunan kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menerapkan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari tata kelola internal organisasi.

1) Pengendalian Internal

Pengendalian internal dilaksanakan melalui penataan prosedur kerja, penguatan mekanisme pelaporan, serta pemantauan berkala terhadap progres pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh bidang dan unit pelaksana teknis (UPT). Pengendalian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, standar operasional, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pelaporan tahunan. Proses ini mencakup penilaian atas capaian output dan perkembangan kegiatan strategis, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta penyusunan rekomendasi perbaikan. Mekanisme tersebut mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan ketercukupan data dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan LKjIP.

3) Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko diterapkan untuk mengidentifikasi potensi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kesehatan di tingkat provinsi. Risiko yang teridentifikasi dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, kemudian dirumuskan langkah penanganan yang efektif. Pendekatan ini membantu menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan serta meminimalkan timbulnya permasalahan terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

4) Peningkatan Mutu dan Penyempurnaan Berkelanjutan

Hasil pengendalian, pemantauan, dan evaluasi digunakan sebagai dasar bagi penyempurnaan proses kerja, peningkatan kualitas tata kelola, serta penguatan efektivitas program dan layanan kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan Dinas Kesehatan dan UPT melakukan adaptasi terhadap perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika pelayanan secara terukur.

Penerapan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, meningkatkan keteraturan proses pelaksanaan program, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	81	82	83	84	85	86	87	
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	53,79	55	55	60	60	65	65	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95	98	98	98	98	98	98	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30	
2	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14	
5	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	88	89	90	91	92	93	94	
6	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5	
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75	80	80	82	85	90	90	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20	
9	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	
10	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	
13	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7	
14	Hipertensi dalam pengendalian	%	11,8	12	15	18	20	22	25	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	89,26	90	91	92	93	94	95	
16	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50	
17	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
18	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3	
19	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90	
20	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	80	80	85	87	89	91	93	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
3	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,14	91,50	91,85	92	92,25	92,65	93	
1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud										
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	
2	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	50	55	60	65	70	75	80	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	83	83	84	84	85	85	
1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)										
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,57	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				520.108.745.258,14		513.580.051.685,11		501.700.955.091,11		508.395.072.502,11		536.165.202.862,11		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				385.795.304.706,83		409.058.530.153,77		410.458.388.800,77		413.941.875.890,77		437.806.279.852,77		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	385.795.304.706,83	BB	409.058.530.153,77	BB	410.458.388.800,77	BB	413.941.875.890,77	BB	437.806.279.852,77	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75	80		82		85		90		90			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,23	91,60		91,80		92		92,90		92,20			
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				379.000.000,00		387.000.000,00		389.000.000,00		471.000.000,00		412.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	22	379.000.000,00	22	387.000.000,00	22	389.000.000,00	22	471.000.000,00	22	412.000.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				187.000.000,00		195.000.000,00		197.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	187.000.000,00	1	195.000.000,00	1	197.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00		
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		159.000.000,00		90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	22	90.000.000,00	22	90.000.000,00	22	90.000.000,00	22	159.000.000,00	22	90.000.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.782.765.039,35		26.919.000.000,00		26.920.383.088,00		27.781.761.507,00		28.998.292.452,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	25.782.765.039,35	1	26.919.000.000,00	1	26.920.383.088,00	1	27.781.761.507,00	1	28.998.292.452,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	99	180		180		180		180		180			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.738.205.039,35		25.750.000.000,00		25.714.483.088,00		26.314.263.507,00		27.505.292.452,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	99	180	24.738.205.039,35	180	25.750.000.000,00	180	25.714.483.088,00	180	26.314.263.507,00	180	27.505.292.452,00		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				904.560.000,00		1.019.000.000,00		1.055.900.000,00		1.317.498.000,00		1.343.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	904.560.000,00	1	1.019.000.000,00	1	1.055.900.000,00	1	1.317.498.000,00	1	1.343.000.000,00		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				236.000.000,00		236.000.000,00		236.000.000,00		236.000.000,00		236.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	236.000.000,00	1	236.000.000,00	1	236.000.000,00	1	236.000.000,00	1	236.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00		
1.02.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
1.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				570.000.000,00		110.000.000,00		575.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	100	570.000.000,00	100	110.000.000,00	100	575.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				450.000.000,00		0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		
Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	450.000.000,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				50.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Pegawai														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.110.500.300,00		1.329.550.330,00		1.065.550.330,00		1.123.600.360,00		1.140.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	1.110.500.300,00	1	1.329.550.330,00	1	1.065.550.330,00		1.123.600.360,00	1	1.140.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1				1				1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1				1				1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1				1				1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1			
	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00				175.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	175.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				570.500.300,00		727.550.330,00		627.550.330,00		684.600.360,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	570.500.300,00	1	727.550.330,00	1	627.550.330,00	1	684.600.360,00	1	700.000.000,00		
1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				165.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	165.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.100.000.000,00		2.644.678.522,00		2.990.000.000,00		910.000.000,00		3.800.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	1	2.100.000.000,00	1	2.644.678.522,00	1	2.990.000.000,00	1	910.000.000,00	1	3.800.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		1		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		1		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	12		1		5		6		6			
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000,00		0,00		350.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	600.000.000,00	0	0,00	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				900.000.000,00		0,00		1.800.000.000,00		250.000.000,00		1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	900.000.000,00	0	0,00	0	1.800.000.000,00	1	250.000.000,00	0	1.000.000.000,00		
1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				300.000.000,00		400.000.000,00		360.000.000,00		100.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	360.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000,00		780.000.000,00		480.000.000,00		210.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	12	300.000.000,00	1	780.000.000,00	5	480.000.000,00	6	210.000.000,00	6	400.000.000,00		
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		364.678.522,00		0,00		200.000.000,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	364.678.522,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.100.000.000,00		0,00		150.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.100.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	2.000.000.000,00		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475.895.676,00		2.240.440.990,00		2.264.700.000,00		2.314.000.000,00		2.394.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	475.895.676,00	12	2.240.440.990,00	12	2.264.700.000,00	12	2.314.000.000,00	12	2.394.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		550.000.000,00		560.000.000,00		570.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	550.000.000,00	12	560.000.000,00	12	570.000.000,00	12	650.000.000,00		
1.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.895.676,00		1.592.440.990,00		1.606.700.000,00		1.646.000.000,00		1.646.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	175.895.676,00	2	1.592.440.990,00	2	1.606.700.000,00	2	1.646.000.000,00	2	1.646.000.000,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.286.126.365,00		1.745.000.000,00		1.757.500.000,00		1.140.000.000,00		1.697.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	100	1.286.126.365,00	100	1.745.000.000,00	100	1.757.500.000,00	100	1.140.000.000,00	100	1.697.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	30		30		30		30		30			
	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						450.000.000,00				400.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	450.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	3	80.000.000,00	3	180.000.000,00	3	200.000.000,00	3	180.000.000,00	3	230.000.000,00		
1.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000.000,00		155.000.000,00		257.500.000,00		60.000.000,00		67.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	30	100.000.000,00	30	155.000.000,00	30	257.500.000,00	30	60.000.000,00	30	67.500.000,00		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	100	50.000.000,00	100	250.000.000,00	100	150.000.000,00	100	50.000.000,00	100	250.000.000,00		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				306.126.365,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	306.126.365,00	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	260.000.000,00	1	250.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	385.795.304.706,83	B	409.058.530.153,77	BB	410.458.388.800,77	BB	413.941.875.890,77	BB	437.806.279.852,77	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,14	91,85		92		92,25		92,65		93			
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		70.000.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	70.000.000,00	1	20.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	0		6		6		6		6			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	0	0,00	6	50.000.000,00	6	10.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				112.618.756.153,45		112.778.756.153,45		112.638.756.153,45		112.638.756.153,45		112.778.756.153,45		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	112.618.756.153,45	12	112.778.756.153,45	12	112.638.756.153,45	12	112.638.756.153,45	12	112.778.756.153,45		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	440	788		788		788		788		788			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				111.891.270.891,45		111.888.756.153,45		111.888.756.153,45		111.888.756.153,45		111.888.756.153,45		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	440	788	111.891.270.891,45	788	111.888.756.153,45	788	111.888.756.153,45	788	111.888.756.153,45	788	111.888.756.153,45		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				727.485.262,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	727.485.262,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		150.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	0	0,00	1	150.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		1.600.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan satuan : Persentase)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	898	0	0,00	0	50.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	1.600.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	57	0	61	61		61							
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		1.350.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	898	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.350.000.000,00		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	57	0	0,00	61	50.000.000,00	61	10.000.000,00	61	10.000.000,00	61	250.000.000,00		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				0,00		325.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		925.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	325.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	925.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		100.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				0,00		200.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		170.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	200.000.000,00	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	170.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		75.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	75.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		75.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0,00	20	75.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	75.000.000,00		
1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				5.414.095.840,71		17.068.755.969,00		14.310.000.000,00		14.230.000.000,00		19.526.648.681,00		
Pemerintahan Daerah														
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	5.414.095.840,71	1	17.068.755.969,00	1	14.310.000.000,00	1	14.230.000.000,00	1	19.526.648.681,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	121		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.000.000.000,00		8.300.000.000,00		5.417.068.912,00		5.159.410.290,00		9.500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	121	5.000.000.000,00	12	8.300.000.000,00	12	5.417.068.912,00	12	5.159.410.290,00	12	9.500.000.000,00		
1.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.095.840,71		8.708.755.969,00		8.882.931.088,00		9.060.589.710,00		9.966.648.681,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	414.095.840,71	12	8.708.755.969,00	12	8.882.931.088,00	12	9.060.589.710,00	12	9.966.648.681,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		381.244.031,00		30.000.000,00		30.000.000,00		460.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0	0,00	6	381.244.031,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	460.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	0		20		20		20					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	0		10		10		10					
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	0	0,00	10	100.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	120.000.000,00		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		181.244.031,00		10.000.000,00		10.000.000,00		240.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	0	0,00	20	181.244.031,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	240.000.000,00		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0	0,00	6	100.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	100.000.000,00		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				144.001.150.000,00		147.974.180.800,00		151.973.933.800,00		155.973.871.800,00		159.973.472.600,00		
Tersusunnya Dokumen BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	144.001.150.000,00	1	147.974.180.800,00	1	151.973.933.800,00	1	155.973.871.800,00	1	159.973.472.600,00		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				144.001.150.000,00		147.974.180.800,00		151.973.933.800,00		155.973.871.800,00		159.973.472.600,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	144.001.150.000,00	1	147.974.180.800,00	1	151.973.933.800,00	1	155.973.871.800,00	1	159.973.472.600,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	385.795.304.706,83	B	409.058.530.153,77	BB	410.458.388.800,77	BB	413.941.875.890,77	BB	437.806.279.852,77	1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	83		84		84		85		85			
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				390.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	390.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	1.000.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	500.000.000,00		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.678.923.849,32		58.693.923.849,32		58.693.923.849,32		58.693.923.849,32		59.093.923.849,32		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	202	223	58.678.923.849,32	223	58.693.923.849,32	223	58.693.923.849,32	223	58.693.923.849,32	223	59.093.923.849,32		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	202	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				798.864.000,00		798.864.000,00		798.864.000,00		798.864.000,00		798.864.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	85.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	0		3		3		3		3			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	0	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.02.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.466.314.444,00		1.800.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		3.100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.466.314.444,00	1	1.800.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	3.100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
					75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				154.654.444,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	154.654.444,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				81.660.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	81.660.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.916.510.236,00		2.200.000.000,00		2.016.510.236,00		2.200.000.000,00		2.016.510.236,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1.916.510.236,00	1	2.200.000.000,00	1	2.016.510.236,00	1	2.200.000.000,00	1	2.016.510.236,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1				1				1			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.916.510.236,00		2.100.000.000,00		1.916.510.236,00		2.100.000.000,00		1.916.510.236,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.916.510.236,00	1	2.100.000.000,00	1	1.916.510.236,00	1	2.100.000.000,00	1	1.916.510.236,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.216.367.320,00		3.880.000.000,00		3.880.000.000,00		3.880.000.000,00		6.400.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	1	3.216.367.320,00	1	3.880.000.000,00	1	3.880.000.000,00	1	3.880.000.000,00	1	6.400.000.000,00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	23		23		23		23		23			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	80		85		90		95		100			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	25		25		25		25		25			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	4		4		4		4		4			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				96.367.320,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	23	96.367.320,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	80	70.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	25	100.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	12	100.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	4	150.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	500.000.000,00		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				24.675.000.000,00		25.908.750.000,00		27.204.187.500,00		28.564.396.875,00		29.992.616.700,00		
Tersusunnya Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	24.675.000.000,00	1	25.908.750.000,00	1	27.204.187.500,00	1	28.564.396.875,00	1	29.992.616.700,00		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				24.675.000.000,00		25.908.750.000,00		27.204.187.500,00		28.564.396.875,00		29.992.616.700,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	24.675.000.000,00	1	25.908.750.000,00	1	27.204.187.500,00	1	28.564.396.875,00	1	29.992.616.700,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	98,57	98,65	385.795.304.706,83	98,70	409.058.530.153,77	98,75	410.458.388.800,77	98,80	413.941.875.890,77	98,85	437.806.279.852,77	1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00		26.000.000,00		35.000.000,00		30.700.000,00		31.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	35.000.000,00	1	30.700.000,00	1	31.500.000,00		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25.000.000,00		26.000.000,00		35.000.000,00		30.700.000,00		31.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	35.000.000,00	1	30.700.000,00	1	31.500.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0		0		0		0					
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00		28.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		28.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.000.000,00		80.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	28.000.000,00	4	80.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				28.000.000,00		80.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	28.000.000,00	4	80.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.000.000,00		140.000.000,00		257.935.144,00		243.165.346,00		375.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	155.000.000,00	1	140.000.000,00	1	257.935.144,00	1	243.165.346,00	1	375.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00		72.500.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000,00	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00	1	72.500.000,00	1	80.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		80.000.000,00		152.935.144,00		100.665.346,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	152.935.144,00	1	100.665.346,00	1	220.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				106.899.483,00		550.000.000,00		115.000.000,00		268.911.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	106.899.483,00	1	550.000.000,00	1	115.000.000,00	1	268.911.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.899.483,00		50.000.000,00		115.000.000,00		268.911.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	106.899.483,00	1	50.000.000,00	1	115.000.000,00	1	268.911.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				848.000.000,00		622.249.509,00		650.008.700,00		671.789.000,00		684.059.181,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	848.000.000,00	12	622.249.509,00	12	650.008.700,00	12	671.789.000,00	12	684.059.181,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				401.000.000,00		416.300.000,00		441.000.000,00		470.700.000,00		485.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	401.000.000,00	12	416.300.000,00	12	441.000.000,00	12	470.700.000,00	12	485.000.000,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				447.000.000,00		205.949.509,00		209.008.700,00		201.089.000,00		199.059.181,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	447.000.000,00	1	205.949.509,00	1	209.008.700,00	1	201.089.000,00	1	199.059.181,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.000.000,00		150.000.000,00		350.000.000,00		215.000.000,00		270.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	240.000.000,00	4	150.000.000,00	4	350.000.000,00	4	215.000.000,00	4	270.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000,00		80.000.000,00		190.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	90.000.000,00	4	80.000.000,00	4	190.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		70.000.000,00		160.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	1	160.000.000,00	1	115.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				120.791.061.314,69		90.539.930.619,34		78.715.066.994,34		83.840.061.034,34		86.927.746.114,34		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	92	93	120.791.061.314,69	93,50	90.539.930.619,34	94	78.715.066.994,34	94,50	83.840.061.034,34	95	86.927.746.114,34	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	7,4	10		9		8		7		6,5			
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	6,3	5,9		5,7		5,5		5,3		5,1			
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	53,79	55		60		60		65		65			
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0,34	0,33		0,33		0,32		0,32		0,32			
	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	6	7		7		7		7		7			
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	11,8	15		18		20		22		25			
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	89,26	91		92		93		94		95			
	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	96	98,90		99,20		99,30		99,40		99,50			
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1,98	1,99		1,99		1,99		1,99		1,99			
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98		98		98		98		98			
	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	0	1		1		2		2		3			
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,84	89		89,20		89,30		89,50		90			
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				36.613.910.821,69		17.720.128.643,00		19.788.856.000,00		28.295.401.000,00		19.250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	36.613.910.821,69	1	17.720.128.643,00	1	19.788.856.000,00	1	28.295.401.000,00	1	19.250.000.000,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	20		4		3		4		4			
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)		2		2		2		2		2			
	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	1		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2	1		1		1		1					
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)		6		7		10		7		25			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		1											
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	7	5		5		3		7		7			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun (Unit)	0	1		0		1		1		1			
	1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						3.350.000.000,00				0,00			
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	1	3.350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.500.000.000,00	0	0,00		
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				8.113.077.641,00		4.900.000.000,00		4.630.000.000,00		4.635.000.000,00		4.750.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2	1	8.113.077.641,00	1	4.900.000.000,00	1	4.630.000.000,00	1	4.635.000.000,00	1	4.750.000.000,00		
1.02.02.1.01.0006 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)				1.550.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		931.700.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	7	5	1.550.000.000,00	5	800.000.000,00	3	900.000.000,00	7	931.700.000,00	7	1.200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.01.0007 - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				496.000.000,00		232.571.143,00		553.000.000,00		600.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	0	1	496.000.000,00	1	232.571.143,00	1	553.000.000,00	1	600.000.000,00	1	950.000.000,00		
1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				7.276.448.480,00		718.000.000,00		625.000.000,00		330.000.000,00		670.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	0	1	7.276.448.480,00	1	718.000.000,00	1	625.000.000,00	1	330.000.000,00	1	670.000.000,00		
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				320.000.000,00		323.000.000,00		326.000.000,00		330.000.000,00		430.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1	320.000.000,00	1	323.000.000,00	1	326.000.000,00	1	330.000.000,00	1	430.000.000,00		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				8.514.543.700,69		5.500.000.000,00		5.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	20	8.514.543.700,69	4	5.500.000.000,00	3	5.000.000.000,00	4	3.500.000.000,00	4	3.000.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				700.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		773.000.000,00		650.000.000,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)		2	700.000.000,00	2	650.000.000,00	2	750.000.000,00	2	773.000.000,00	2	650.000.000,00		
1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				188.555.000,00		197.982.000,00		250.000.000,00		218.275.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)		6	188.555.000,00	7	197.982.000,00	10	250.000.000,00	7	218.275.000,00	25	350.000.000,00		
1.02.02.1.01.0024 - Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				3.184.000.000,00		0,00		2.500.000.000,00		2.684.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terbangunnya Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun (Unit)	0	1	3.184.000.000,00	0	0,00	1	2.500.000.000,00	1	2.684.000.000,00	1	3.000.000.000,00		
1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				700.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00						
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	700.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	750.000.000,00						
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.221.286.000,00		3.848.575.500,00		3.654.856.000,00		3.143.426.000,00		3.500.000.000,00						
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		1	2.221.286.000,00		3.848.575.500,00		3.654.856.000,00		3.143.426.000,00		3.500.000.000,00						
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				45.491.207.976,00		54.139.243.942,34		51.744.380.541,34		48.913.615.000,34		56.375.111.031,34						
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	45.491.207.976,00	1	54.139.243.942,34	1	51.744.380.541,34	1	48.913.615.000,34	1	56.375.111.031,34						
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	140	636				636				636				636			
	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	0	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	4	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	7	7				7				7				7			
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	300	400				420				430				450		465	
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	0	55				60				65				70		75	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	1		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	8	19		19		19		19		19			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	28	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	32	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				525.000.000,00		623.000.000,00		650.000.000,00		671.000.000,00		750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	300	400	525.000.000,00	420	623.000.000,00	430	650.000.000,00	450	671.000.000,00	465	750.000.000,00		
1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				525.000.000,00		610.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	140	636	525.000.000,00	636	610.000.000,00	636	500.000.000,00	636	500.000.000,00	636	600.000.000,00		
1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				800.000.000,00		830.000.000,00		770.000.000,00		770.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	32	7	800.000.000,00	7	830.000.000,00	7	770.000.000,00	7	770.000.000,00	7	850.000.000,00		
1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				200.000.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		55.315.800,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	55.315.800,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				175.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		175.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1	175.000.000,00	1	160.000.000,00	1	200.000.000,00	1	175.000.000,00	1	240.000.000,00		
1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.850.000.000,00		2.186.000.000,00		1.900.000.000,00		1.500.000.000,00		1.800.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	4	4	1.850.000.000,00	4	2.186.000.000,00	4	1.900.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.800.000.000,00		
1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				450.000.000,00		173.500.000,00		200.000.000,00		199.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	450.000.000,00	1	173.500.000,00	1	200.000.000,00	1	199.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				250.000.000,00		775.000.000,00		500.000.000,00		1.044.750.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	28	6	250.000.000,00	6	775.000.000,00	6	500.000.000,00	6	1.044.750.000,00	6	500.000.000,00		
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				700.000.000,00		545.000.000,00		550.000.000,00		480.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	7	7	700.000.000,00	7	545.000.000,00	7	550.000.000,00	7	480.000.000,00	7	600.000.000,00		
1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				200.000.000,00		164.000.000,00		152.000.000,00		106.216.668,00		170.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	164.000.000,00	1	152.000.000,00	1	106.216.668,00	1	170.000.000,00		
1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3.750.000.000,00		5.150.000.000,00		5.000.000.000,00		2.524.861.250,00		5.200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	8	19	3.750.000.000,00	19	5.150.000.000,00	19	5.000.000.000,00	19	2.524.861.250,00	19	5.200.000.000,00		
1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				225.000.000,00		247.500.000,00		300.000.000,00		269.775.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	225.000.000,00	1	247.500.000,00	1	300.000.000,00	1	269.775.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				200.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	0		200.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	175.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				200.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	0	55	200.000.000,00	60	160.000.000,00	65	180.000.000,00	70	200.000.000,00	75	350.000.000,00		
1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				32.553.000.000,00		39.195.294.504,34		36.916.007.409,34		37.222.079.837,34		40.565.111.031,34		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	32.553.000.000,00	1	39.195.294.504,34	1	36.916.007.409,34	1	37.222.079.837,34	1	40.565.111.031,34		
1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				200.000.000,00		220.000.000,00		300.000.000,00		239.800.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	4	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	300.000.000,00	1	239.800.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.02.1.02.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				300.000.000,00		830.000.000,00		850.000.000,00		799.300.000,00		850.000.000,00		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	830.000.000,00	1	850.000.000,00	1	799.300.000,00		850.000.000,00		
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1.500.000.000,00		740.000.000,00		684.000.000,00		532.400.000,00		670.000.000,00		
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.500.000.000,00	1	740.000.000,00	1	684.000.000,00	1	532.400.000,00	1	670.000.000,00		
1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				200.000.000,00		247.611.938,00		272.373.132,00		299.610.445,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1	200.000.000,00		247.611.938,00	1	272.373.132,00	1	299.610.445,00	1	400.000.000,00		
1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				185.000.000,00		203.500.000,00		300.000.000,00		223.850.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	185.000.000,00	1	203.500.000,00	1	300.000.000,00	1	223.850.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				200.000.000,00		0,00		350.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	1	200.000.000,00	0	0,00	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				150.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		510.000.000,00		700.000.000,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	0	1	150.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00	1	510.000.000,00	1	700.000.000,00		
1.02.02.1.02.0026 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				153.207.976,00		148.837.500,00		200.000.000,00		165.656.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)	0	1	153.207.976,00	1	148.837.500,00	1	200.000.000,00	1	165.656.000,00	1	280.000.000,00		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				850.000.000,00		700.000.000,00		497.289.655,00		465.400.000,00		500.000.000,00		
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	15	15	850.000.000,00	15	700.000.000,00	15	497.289.655,00	15	465.400.000,00	15	500.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				850.000.000,00		700.000.000,00		497.289.655,00		465.400.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	15	15	850.000.000,00	15	700.000.000,00	15	497.289.655,00	15	465.400.000,00	15	500.000.000,00		
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1.575.000.000,00		985.000.000,00		1.120.000.000,00		1.250.000.000,00		1.700.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0	36	1.575.000.000,00	36	985.000.000,00	36	1.120.000.000,00	36	1.250.000.000,00	36	1.700.000.000,00		
	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	9		9		9		9					
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	36	36		36		36		36					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				500.000.000,00		335.000.000,00		370.000.000,00		400.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	9	500.000.000,00	9	335.000.000,00	9	370.000.000,00	9	400.000.000,00	9	550.000.000,00		
1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				500.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0	36	500.000.000,00	36	350.000.000,00	36	400.000.000,00	36	450.000.000,00	36	600.000.000,00		
1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				575.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	36	36	575.000.000,00	36	300.000.000,00	36	350.000.000,00	36	400.000.000,00	36	550.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama	Utama	120.791.061.314,69	Utama	90.539.930.619,34	Utama	78.715.066.994,34	Utama	83.840.061.034,34	Utama	86.927.746.114,34	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				19.900.000.000,00		1.300.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		1.453.351.319,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	4	0	19.900.000.000,00	4	1.300.000.000,00	4	330.000.000,00	4	330.000.000,00	4	1.453.351.319,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20	3		3		3		3		3			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	90	90		92		94		96		98			
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	0		0		0		1		0			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	3	0		3		3		3		3			
1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	4	0	0,00	4	50.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	50.000.000,00		
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	3	0	0,00	3	100.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.000.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20	3	2.000.000.000,00	3	250.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	250.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.000.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		450.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	90	90	2.000.000.000,00	92	250.000.000,00	94	100.000.000,00	96	100.000.000,00	98	450.000.000,00		
1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00		
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				0,00		150.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	0,00	0	150.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	150.000.000,00		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				15.900.000.000,00		500.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		453.351.319,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12	15.900.000.000,00	12	500.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	453.351.319,00		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0,00		150.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		160.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	160.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				0,00		25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	0	0,00	12	25.000.000,00	12	0,00	12	0,00	12	25.000.000,00		
1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				0,00		125.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Persentase)	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	0	0,00	1	125.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	125.000.000,00		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	0		1		1		1		1			
1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit	Satelit	120.791.061.314,69	Satelit	90.539.930.619,34	Satelit	78.715.066.994,34	Satelit	83.840.061.034,34	Satelit	86.927.746.114,34	1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				14.700.000.000,00		12.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		3.500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	1	14.700.000.000,00	1	12.300.000.000,00	1	2.300.000.000,00	1	2.300.000.000,00	1	3.500.000.000,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	82	15		20		20		20		20			
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	10	80		80		80		80		80			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0		0		0		0		0			
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				3.400.000.000,00		10.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	82	15	3.400.000.000,00	20	10.000.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	10	80	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	500.000.000,00	80	500.000.000,00	80	1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				10.100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	1	10.100.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				290.000.000,00		1.100.000.000,00		783.489.764,00		600.000.000,00		1.183.489.764,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	290.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	783.489.764,00	1	600.000.000,00	1	1.183.489.764,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		183.489.764,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	183.489.764,00		
1.02.02.1.02.0031 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				240.000.000,00		1.000.000.000,00		683.489.764,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	240.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	683.489.764,00	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				200.000.000,00		375.051.034,00		375.051.034,00		375.051.034,00		500.000.000,00		
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				200.000.000,00		375.051.034,00		375.051.034,00		375.051.034,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provins	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	500.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,84	89	120.791.061.314,69	89,20	90.539.930.619,34	89,30	78.715.066.994,34	89,50	83.840.061.034,34	90	86.927.746.114,34	1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				900.942.517,00		1.300.507.000,00		1.310.000.000,00		830.594.000,00		1.312.794.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	900.942.517,00	1	1.300.507.000,00	1	1.310.000.000,00	1	830.594.000,00	1	1.312.794.000,00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				115.400.000,00		175.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00		225.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	115.400.000,00	1	175.000.000,00	1	195.000.000,00	1	210.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				83.842.000,00		338.872.000,00		245.000.000,00		102.700.000,00		365.000.000,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1	1	83.842.000,00	1	338.872.000,00	1	245.000.000,00	1	102.700.000,00	1	365.000.000,00		
1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				701.700.517,00		766.635.000,00		850.000.000,00		497.894.000,00		702.794.000,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	701.700.517,00	1	766.635.000,00	1	850.000.000,00	1	497.894.000,00	1	702.794.000,00		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				150.000.000,00		175.000.000,00		286.000.000,00		300.000.000,00		318.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	286.000.000,00	1	300.000.000,00	1	318.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				150.000.000,00		175.000.000,00		286.000.000,00		300.000.000,00		318.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	286.000.000,00	1	300.000.000,00	1	318.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				11.751.722.000,62		12.459.870.931,00		11.164.716.556,00		9.306.054.387,00		10.274.047.874,00		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4,27	4,28	11.751.722.000,62	4,29	12.459.870.931,00	4,29	11.164.716.556,00	4,30	9.306.054.387,00	4,30	10.274.047.874,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				7.249.740.882,00		7.850.000.000,00		6.785.000.000,00		5.285.000.000,00		5.300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	134	260	7.249.740.882,00	260	7.850.000.000,00	260	6.785.000.000,00	260	5.285.000.000,00	260	5.300.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	130	57		57		57		57		57			
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				7.035.000.000,00		7.700.000.000,00		6.700.000.000,00		5.200.000.000,00		5.200.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	130	57	7.035.000.000,00	57	7.700.000.000,00	57	6.700.000.000,00	57	5.200.000.000,00	57	5.200.000.000,00		
1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				214.740.882,00		150.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	134	260	214.740.882,00	260	150.000.000,00	260	85.000.000,00	260	85.000.000,00	260	100.000.000,00		
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				785.000.000,00		864.536.753,00		724.382.378,00		365.720.209,00		703.662.662,00		
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	48	50	785.000.000,00	50	864.536.753,00	50	724.382.378,00	50	365.720.209,00	50	703.662.662,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				535.000.000,00		554.536.753,00		389.382.378,00		245.720.209,00		503.662.662,00		
Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	48	50	535.000.000,00	50	554.536.753,00	50	389.382.378,00	50	245.720.209,00	50	503.662.662,00		
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				250.000.000,00		310.000.000,00		335.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	310.000.000,00	1	335.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	80	85	11.751.722.000,62	87	12.459.870.931,00	89	11.164.716.556,00	91	9.306.054.387,00	93	10.274.047.874,00	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				1.271.646.940,62		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	481	12	1.271.646.940,62	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00		
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.271.646.940,62		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	481	12	1.271.646.940,62	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00		
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	100.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	250.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	57	0		61		61		70		75			
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	57	0	0,00	61	100.000.000,00	61	10.000.000,00	70	10.000.000,00	75	250.000.000,00		
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	50	60	11.751.722.000,62	65	12.459.870.931,00	70	11.164.716.556,00	75	9.306.054.387,00	80	10.274.047.874,00	1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				2.045.334.178,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	50	2.045.334.178,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00		
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2.045.334.178,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	50	2.045.334.178,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00				
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				400.000.000,00		624.948.966,00		624.948.966,00		624.948.966,00		1.000.000.000,00				
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	400.000.000,00	1	624.948.966,00	1	624.948.966,00	0	624.948.966,00	0	1.000.000.000,00				
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	137	161				169				176					183
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				200.000.000,00		324.948.966,00		324.948.966,00		324.948.966,00		500.000.000,00				
Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	137	161	200.000.000,00	169	324.948.966,00	176	324.948.966,00	183	324.948.966,00	183	500.000.000,00				
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00				
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	500.000.000,00				
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)			
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				190.757.236,00		561.656.548,00		481.002.614,00		419.344.129,00		252.785.847,00				
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (%)	88	90	190.757.236,00	91	561.656.548,00	92	481.002.614,00	93	419.344.129,00	94	252.785.847,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan			
1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				110.000.000,00		310.000.000,00		270.000.000,00		269.344.129,00		110.000.000,00				
Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	28	25	110.000.000,00	31	310.000.000,00	40	270.000.000,00	40	269.344.129,00	43	110.000.000,00				
1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				110.000.000,00		310.000.000,00		270.000.000,00		269.344.129,00		110.000.000,00				
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanljut Penerbitan Perizinan (Sarana)	28	25	110.000.000,00	31	310.000.000,00	40	270.000.000,00	40	269.344.129,00	43	110.000.000,00				
1.02.04.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				80.757.236,00		251.656.548,00		211.002.614,00		150.000.000,00		142.785.847,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	0	2	80.757.236,00	2	251.656.548,00	3	211.002.614,00	3	150.000.000,00	4	142.785.847,00		
1.02.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				80.757.236,00		251.656.548,00		211.002.614,00		150.000.000,00		142.785.847,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	0	2	80.757.236,00	2	251.656.548,00	3	211.002.614,00	3	150.000.000,00	4	142.785.847,00		
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
													1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
													1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.579.900.000,00		960.063.433,00		881.780.126,00		887.737.061,00		904.343.174,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	0	14,29	1.579.900.000,00	28,57	960.063.433,00	42,86	881.780.126,00	42,86	887.737.061,00	57,14	904.343.174,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				849.900.000,00		321.171.159,00		260.000.000,00		310.000.000,00		321.466.217,00		
Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	7	7	849.900.000,00	7	321.171.159,00	7	260.000.000,00	7	310.000.000,00		321.466.217,00		
1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				849.900.000,00		321.171.159,00		260.000.000,00		310.000.000,00		321.466.217,00		
Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	7	7	849.900.000,00	7	321.171.159,00	7	260.000.000,00	7	310.000.000,00		321.466.217,00		
1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				500.000.000,00		353.000.000,00		328.255.687,00		322.492.269,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	7	500.000.000,00	7	353.000.000,00	7	328.255.687,00	7	322.492.269,00	7	300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	7				7				7			
1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				350.000.000,00		225.000.000,00		176.800.000,00		212.492.269,00		200.000.000,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	7	350.000.000,00	7	225.000.000,00	7	176.800.000,00	7	212.492.269,00	7	200.000.000,00		
1.02.05.1.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000,00		128.000.000,00		151.455.687,00		110.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	7	150.000.000,00	7	128.000.000,00	7	151.455.687,00	7	110.000.000,00	7	100.000.000,00		
1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				150.000.000,00		155.000.000,00		130.000.000,00		125.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	0	7	150.000.000,00	7	155.000.000,00	7	130.000.000,00	7	125.000.000,00	7	100.000.000,00		
1.02.05.1.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				150.000.000,00		155.000.000,00		130.000.000,00		125.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	0	7	150.000.000,00	7	155.000.000,00	7	130.000.000,00	7	125.000.000,00	7	100.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
													1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	0	14,29		28,57		42,86		42,86		57,14		1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	
1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				80.000.000,00		130.892.274,00		163.524.439,00		130.244.792,00		182.876.957,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	130.892.274,00	1	163.524.439,00	1	130.244.792,00	1	182.876.957,00		
1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				80.000.000,00		130.892.274,00		163.524.439,00		130.244.792,00		182.876.957,00		
Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	130.892.274,00	1	163.524.439,00	1	130.244.792,00	1	182.876.957,00		

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan									
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
4.	Persentase Fasyankes Pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	52,80	53	53,50	54	54,50	55	
5.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
4.	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	positif	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
5.	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	positif	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	
6.	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	positif	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30	
7.	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	positif	%	88	89	90	91	92	93	94	
8.	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	positif	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95	
9.	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	positif	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14	
10.	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	positif	%	80	80	85	87	89	91	93	
11.	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	negatif	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5	
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	91,14	91,50	91,85	92	92,25	92,65	93	
13.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	positif	Indeks	75	80	80	82	85	90	90	
14.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
15.	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	positif	%	50	55	60	65	70	75	80	
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20	
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	98,57	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	83	83	83	84	84	85	85	
19.	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	negatif	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
20.	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
21.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
22.	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	negatif	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	
23.	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	positif	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7	
24.	Hipertensi dalam pengendalian	positif	%	11,8	12	15	18	20	22	25	
25.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	%	89,26	90	91	92	93	94	95	
26.	Persentase Puskesmas terakreditasi	positif	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50	
27.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	positif	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
28.	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	positif	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3	
29.	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	positif	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90	
30.	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	positif	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	81	82	83	84	85	86	87	
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	53,79	55	55	60	60	65	65	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95	98	98	98	98	98	98	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30	
2	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14	
5	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	88	89	90	91	92	93	94	
6	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75	80	80	82	85	90	90	
7	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5	
8	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20	
10	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	
13	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7	
14	Hipertensi dalam pengendalian	%	11,8	12	15	18	20	22	25	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	89,26	90	91	92	93	94	95	
16	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50	
17	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
18	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3	
19	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90	
20	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
2	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
3	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	80	80	85	87	89	91	93	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,14	91,50	91,85	92	92,25	92,65	93	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				283.205.648.934,78		281.592.936.953,45		280.592.689.953,45		284.592.627.953,45		298.592.228.753,45		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				262.034.001.994,16		278.867.936.953,45		279.192.689.953,45		283.192.627.953,45		295.553.877.434,45		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	262.034.001.994,16	B	278.867.936.953,45	BB	279.192.689.953,45	BB	283.192.627.953,45	BB	295.553.877.434,45	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,14	91,85		92		92,25		92,65		93			
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		70.000.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	0	0,00	6	70.000.000,00	6	20.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	0	0,00	6	50.000.000,00	6	10.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				112.618.756.153,45		112.778.756.153,45		112.638.756.153,45		112.638.756.153,45		112.778.756.153,45		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	112.618.756.153,45	1	112.778.756.153,45	1	112.638.756.153,45	1	112.638.756.153,45	1	112.778.756.153,45		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	440	788		788		788		788		788			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				111.891.270.891,45		111.888.756.153,45		111.888.756.153,45		111.888.756.153,45		111.888.756.153,45		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	440	788	111.891.270.891,45	788	111.888.756.153,45	788	111.888.756.153,45	788	111.888.756.153,45	788	111.888.756.153,45		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				727.485.262,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	727.485.262,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00	12	730.000.000,00		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		150.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	0	0,00	1	150.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		1.600.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan satuan : Persentase)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	898	0	0,00	0	50.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	1.600.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	57	0		61		61		61		61			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		1.350.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	898	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	57	0	0,00	61	50.000.000,00	61	10.000.000,00	61	10.000.000,00	61	250.000.000,00		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				0,00		325.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		925.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	325.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	925.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		100.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		200.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		170.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0,00	20	200.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	170.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		75.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	75.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		75.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0,00	20	75.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	75.000.000,00		
1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.414.095.840,71		17.068.755.969,00		14.310.000.000,00		14.230.000.000,00		19.526.648.681,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	5.414.095.840,71	1	17.068.755.969,00	1	14.310.000.000,00	1	14.230.000.000,00	1	19.526.648.681,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	121		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.000.000.000,00		8.300.000.000,00		5.417.068.912,00		5.159.410.290,00		9.500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	121	5.000.000.000,00	12	8.300.000.000,00	12	5.417.068.912,00	12	5.159.410.290,00	12	9.500.000.000,00		
1.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.095.840,71		8.708.755.969,00		8.882.931.088,00		9.060.589.710,00		9.966.648.681,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	414.095.840,71	12	8.708.755.969,00	12	8.882.931.088,00	12	9.060.589.710,00	12	9.966.648.681,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		381.244.031,00		30.000.000,00		30.000.000,00		460.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	0	0,00	20	381.244.031,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	460.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0		6		6		6					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	0		10		10		10					
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	0	0,00	10	100.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	120.000.000,00		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		181.244.031,00		10.000.000,00		10.000.000,00		240.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	0	0,00	20	181.244.031,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	240.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0	0,00	6	100.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	100.000.000,00		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				144.001.150.000,00		147.974.180.800,00		151.973.933.800,00		155.973.871.800,00		159.973.472.600,00		
Tersusunnya Dokumen BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	144.001.150.000,00	1	147.974.180.800,00	1	151.973.933.800,00	1	155.973.871.800,00	1	159.973.472.600,00		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				144.001.150.000,00		147.974.180.800,00		151.973.933.800,00		155.973.871.800,00		159.973.472.600,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	144.001.150.000,00	1	147.974.180.800,00	1	151.973.933.800,00	1	155.973.871.800,00	1	159.973.472.600,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				19.900.000.000,00		1.625.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		1.788.351.319,00		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama	Utama	19.900.000.000,00	Utama	1.625.000.000,00	Utama	390.000.000,00	Utama	390.000.000,00	Utama	1.788.351.319,00	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				19.900.000.000,00		1.300.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		1.453.351.319,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	0	19.900.000.000,00	0	1.300.000.000,00	0	330.000.000,00	1	330.000.000,00	0	1.453.351.319,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	3	0		3		3		3		3			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	90	90		92		94		96		98			
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	4	0		4		4		4		4			
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		1			
1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	4	0	0,00	4	50.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	50.000.000,00		
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	3	0	0,00	3	100.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.000.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	20	3	2.000.000.000,00	3	250.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	250.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.000.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		450.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	90	90	2.000.000.000,00	92	250.000.000,00	94	100.000.000,00	96	100.000.000,00	98	450.000.000,00		
1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00		
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				0,00		150.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	0,00	0	150.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	150.000.000,00		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				15.900.000.000,00		500.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		453.351.319,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12	15.900.000.000,00	12	500.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	453.351.319,00		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0,00		150.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		160.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	160.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				0,00		25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	0	0,00	12	25.000.000,00	12	0,00	12	0,00	12	25.000.000,00		
1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				0,00		125.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Persentase)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	0	0	0,00	1	125.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	125.000.000,00		
	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	0		1		1		1					
	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	0		1		1		1					
1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.271.646.940,62		1.100.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.250.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	80	85	1.271.646.940,62	87	1.100.000.000,00	89	1.010.000.000,00	91	1.010.000.000,00	93	1.250.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				1.271.646.940,62		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	481	12	1.271.646.940,62	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00		
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.271.646.940,62		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	481	12	1.271.646.940,62	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00	165	1.000.000.000,00		
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	100.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	250.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	57	0		61		61		70		75			
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	57	0	0,00	61	100.000.000,00	61	10.000.000,00	70	10.000.000,00	75	250.000.000,00		
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan									
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
4.	Persentase Fasyankes Pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	52,80	53	53,50	54	54,50	55	
5.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
3.	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	positif	%	80	80	85	87	89	91	93	
4.	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	positif	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	91,14	91,50	91,85	92	92,25	92,65	93	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	81	82	83	84	85	86	87	
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	53,79	55	55	60	60	65	65	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95	98	98	98	98	98	98	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30	
2	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14	
5	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	88	89	90	91	92	93	94	
6	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5	
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75	80	80	82	85	90	90	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20	
9	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	
10	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	
13	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7	
14	Hipertensi dalam pengendalian	%	11,8	12	15	18	20	22	25	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	89,26	90	91	92	93	94	95	
16	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50	
17	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
18	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3	
19	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90	
20	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
3	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	50	55	60	65	70	75	80	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	83	83	84	84	85	85	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				108.148.450.027,32		109.523.059.061,32		99.818.496.561,32		101.178.705.936,32		110.606.925.761,32		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				90.393.115.849,32		92.982.673.849,32		93.594.621.585,32		95.138.320.724,32		101.903.050.785,32		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	90.393.115.849,32	B	92.982.673.849,32	BB	93.594.621.585,32	BB	95.138.320.724,32	BB	101.903.050.785,32	1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	83				84				85			
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				390.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	390.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	400.000.000,00	6	1.000.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1				1				1			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	500.000.000,00		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.678.923.849,32		58.693.923.849,32		58.693.923.849,32		58.693.923.849,32		59.093.923.849,32		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	202	223	58.678.923.849,32	223	58.693.923.849,32	223	58.693.923.849,32	223	58.693.923.849,32	223	59.093.923.849,32		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2				2				2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1				1				1			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		57.795.059.849,32		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	202	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32	223	57.795.059.849,32		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				798.864.000,00		798.864.000,00		798.864.000,00		798.864.000,00		798.864.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00	1	798.864.000,00		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	85.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	0	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	0	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.02.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.466.314.444,00		1.800.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		3.100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.466.314.444,00	1	1.800.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	3.100.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				154.654.444,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	154.654.444,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Perundang-Undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				81.660.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	81.660.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.916.510.236,00		2.200.000.000,00		2.016.510.236,00		2.200.000.000,00		2.016.510.236,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1.916.510.236,00	1	2.200.000.000,00	1	2.016.510.236,00	1	2.200.000.000,00	1	2.016.510.236,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1				1		1		1			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.916.510.236,00		2.100.000.000,00		1.916.510.236,00		2.100.000.000,00		1.916.510.236,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.916.510.236,00	1	2.100.000.000,00	1	1.916.510.236,00	1	2.100.000.000,00	1	1.916.510.236,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.216.367.320,00		3.880.000.000,00		3.880.000.000,00		3.880.000.000,00		6.400.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	80	3.216.367.320,00	85	3.880.000.000,00	90	3.880.000.000,00	95	3.880.000.000,00	100	6.400.000.000,00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	4		4		4		4		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	25		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	23		23		23		23		23			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				96.367.320,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	23	96.367.320,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	80	70.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	25	100.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	12	100.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00	3	2.400.000.000,00		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	4	150.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	500.000.000,00		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				24.675.000.000,00		25.908.750.000,00		27.204.187.500,00		28.564.396.875,00		29.992.616.700,00		
Tersusunnya Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	24.675.000.000,00	1	25.908.750.000,00	1	27.204.187.500,00	1	28.564.396.875,00	1	29.992.616.700,00		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				24.675.000.000,00		25.908.750.000,00		27.204.187.500,00		28.564.396.875,00		29.992.616.700,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	24.675.000.000,00	1	25.908.750.000,00	1	27.204.187.500,00	1	28.564.396.875,00	1	29.992.616.700,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				15.310.000.000,00		13.895.051.034,00		3.578.540.798,00		3.395.051.034,00		5.683.489.764,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit	Satelit	15.310.000.000,00	Satelit	13.895.051.034,00	Satelit	3.578.540.798,00	Satelit	3.395.051.034,00	Satelit	5.683.489.764,00	1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				14.700.000.000,00		12.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		3.500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	2	14.700.000.000,00	2	12.300.000.000,00	2	2.300.000.000,00	2	2.300.000.000,00	2	3.500.000.000,00		
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	10	80		80		80		80		80			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	82	15		20		20		20		20			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				3.400.000.000,00		10.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	82	15	3.400.000.000,00	20	10.000.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	10	80	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	500.000.000,00	80	500.000.000,00	80	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				10.100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	1	10.100.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				290.000.000,00		1.100.000.000,00		783.489.764,00		600.000.000,00		1.183.489.764,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	290.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	783.489.764,00	1	600.000.000,00	1	1.183.489.764,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1				1				1			
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		183.489.764,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	183.489.764,00		
1.02.02.1.02.0031 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				240.000.000,00		1.000.000.000,00		683.489.764,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	240.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	683.489.764,00	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				200.000.000,00		375.051.034,00		375.051.034,00		375.051.034,00		500.000.000,00		
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				200.000.000,00		375.051.034,00		375.051.034,00		375.051.034,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	375.051.034,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provins	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.1.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.445.334.178,00		2.645.334.178,00		2.645.334.178,00		2.645.334.178,00		3.020.385.212,00		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	50	60	2.445.334.178,00	65	2.645.334.178,00	70	2.645.334.178,00	75	2.645.334.178,00	80	3.020.385.212,00	1.02.0.00.0.00.02.00 02 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				2.045.334.178,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	50	2.045.334.178,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00		
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2.045.334.178,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		2.020.385.212,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	50	2.045.334.178,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00	50	2.020.385.212,00		
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				400.000.000,00		624.948.966,00		624.948.966,00		624.948.966,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	400.000.000,00	1	624.948.966,00	1	624.948.966,00	0	624.948.966,00	0	1.000.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	137	161				169				176			
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				200.000.000,00		324.948.966,00		324.948.966,00		324.948.966,00		500.000.000,00		
Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	137	161	200.000.000,00	169	324.948.966,00	176	324.948.966,00	183	324.948.966,00	183	500.000.000,00		
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	500.000.000,00		

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

[illegible]

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	positif	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	
4.	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	positif	%	50	55	60	65	70	75	80	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	83	83	83	84	84	85	85	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	81	82	83	84	85	86	87	
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	53,79	55	55	60	60	65	65	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95	98	98	98	98	98	98	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	88	89	90	91	92	93	94	
2	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14	
5	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30	
6	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5	
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75	80	80	82	85	90	90	
8	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20	
10	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	
13	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7	
14	Hipertensi dalam pengendalian	%	11,8	12	15	18	20	22	25	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	89,26	90	91	92	93	94	95	
16	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50	
17	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
18	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3	
19	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90	
20	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,57	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5.068.224.283,00		5.868.224.283,00		6.368.224.283,00		5.745.230.138,00		6.245.230.138,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.618.299.483,00		1.663.249.509,00		1.603.843.844,00		1.640.965.346,00		1.681.559.181,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan				1.618.299.483,00		1.663.249.509,00		1.603.843.844,00		1.640.965.346,00		1.681.559.181,00	1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00		26.000.000,00		35.000.000,00		30.700.000,00		31.500.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	35.000.000,00	1	30.700.000,00	1	31.500.000,00		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25.000.000,00		26.000.000,00		35.000.000,00		30.700.000,00		31.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	35.000.000,00	1	30.700.000,00	1	31.500.000,00		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				115.400.000,00		117.000.000,00		130.900.000,00		141.400.000,00		145.000.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	115.400.000,00	0	117.000.000,00	0	130.900.000,00	0	141.400.000,00	0	145.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				115.400.000,00		117.000.000,00		130.900.000,00		141.400.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	115.400.000,00	1	117.000.000,00	1	130.900.000,00	1	141.400.000,00	1	145.000.000,00		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00		28.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		28.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	28.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	28.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				200.000.000,00		140.000.000,00		257.935.144,00		243.165.346,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	140.000.000,00	1	257.935.144,00	1	243.165.346,00	1	375.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00		72.500.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000,00	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00	1	72.500.000,00	1	80.000.000,00		
1.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		80.000.000,00		152.935.144,00		100.665.346,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	120.000.000,00	1	80.000.000,00	1	152.935.144,00	1	100.665.346,00	1	220.000.000,00		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				106.899.483,00		550.000.000,00		115.000.000,00		268.911.000,00		100.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	106.899.483,00	1	550.000.000,00	0	115.000.000,00	0	268.911.000,00	0	100.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.899.483,00		50.000.000,00		115.000.000,00		268.911.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	106.899.483,00	1	50.000.000,00	1	115.000.000,00	1	268.911.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				848.000.000,00		622.249.509,00		650.008.700,00		671.789.000,00		684.059.181,00		
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	848.000.000,00	12	622.249.509,00	12	650.008.700,00	12	671.789.000,00	12	684.059.181,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				401.000.000,00		416.300.000,00		441.000.000,00		470.700.000,00		485.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	401.000.000,00	12	416.300.000,00	12	441.000.000,00	12	470.700.000,00	12	485.000.000,00		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				447.000.000,00		205.949.509,00		209.008.700,00		201.089.000,00		199.059.181,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	447.000.000,00	1	205.949.509,00	1	209.008.700,00	1	201.089.000,00	1	199.059.181,00		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000,00		150.000.000,00		350.000.000,00		215.000.000,00		270.000.000,00		
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	270.000.000,00	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00	1	215.000.000,00	1	270.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4		4		4		4		4			
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.000.000,00		80.000.000,00		190.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	120.000.000,00	4	80.000.000,00	4	190.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		70.000.000,00		160.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	1	160.000.000,00	1	115.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.223.244.000,00		4.054.082.500,00		4.580.856.000,00		3.954.020.000,00		4.360.794.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88.84%	89%	3.223.244.000,00	89.20%	4.054.082.500,00	89.30%	4.580.856.000,00	89.50%	3.954.020.000,00	90%	4.360.794.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3.073.244.000,00		3.879.082.500,00		4.294.856.000,00		3.654.020.000,00		4.042.794.000,00		
Jumlah Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	3.073.244.000,00	1	3.879.082.500,00	1	4.294.856.000,00	1	3.654.020.000,00	1	4.042.794.000,00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	1				1				1			
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1	1				1				1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1				1				1			
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				145.000.000,00		175.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00		225.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	145.000.000,00	1	175.000.000,00	1	195.000.000,00	1	210.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				83.842.000,00		88.872.000,00		95.000.000,00		102.700.000,00		115.000.000,00		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1	1	83.842.000,00	1	88.872.000,00	1	95.000.000,00	1	102.700.000,00	1	115.000.000,00		
1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				623.116.000,00		766.635.000,00		850.000.000,00		497.894.000,00		702.794.000,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	623.116.000,00	1	766.635.000,00	1	850.000.000,00	1	497.894.000,00	1	702.794.000,00		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.221.286.000,00		2.848.575.500,00		3.154.856.000,00		2.843.426.000,00		3.000.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	1	2.221.286.000,00	1	2.848.575.500,00	1	3.154.856.000,00	1	2.843.426.000,00	1	3.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				150.000.000,00		175.000.000,00		286.000.000,00		300.000.000,00		318.000.000,00		
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	286.000.000,00	1	300.000.000,00	1	318.000.000,00		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				150.000.000,00		175.000.000,00		286.000.000,00		300.000.000,00		318.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	286.000.000,00	1	300.000.000,00	1	318.000.000,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				226.680.800,00		150.892.274,00		183.524.439,00		150.244.792,00		202.876.957,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				226.680.800,00		150.892.274,00		183.524.439,00		150.244.792,00		202.876.957,00	1.02.0.00.0.00.02.00 04 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	
1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				226.680.800,00		150.892.274,00		183.524.439,00		150.244.792,00		202.876.957,00		
Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1	226.680.800,00	1	150.892.274,00	1	183.524.439,00	1	150.244.792,00	1	202.876.957,00		
1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				226.680.800,00		150.892.274,00		183.524.439,00		150.244.792,00		202.876.957,00		
Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1	226.680.800,00	1	150.892.274,00	1	183.524.439,00	1	150.244.792,00	1	202.876.957,00		

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan									
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63	
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55	
4.	Persentase Fasyankes Pemerintah dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	52,80	53	53,50	54	54,50	55	
5.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	98,57	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	



Laman
dinkes.kepriprov.go.id



Pos-el
dinkes@kepripov.go.id



Youtube
Dinkes Prov Kepri



Instagram
@dinkesprovkepri

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau